LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING
Admiral Nelson Aritonang, Ph. D
Rosilawati, S. Sos, MPS. Sp

Oleh:
ERLANG ADHI NEGARA
NRP. 20.03.116

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	: LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa	: Erlang Adhi Negara
NRP	: 20.03.116
Program	: Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing :

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Admiral Nelson Aritonang, Ph. D	**Rosilawati, S. Sos, MPS. Sp**

Mengetahui :
Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktikum Laboratorium dan penulisan laporan akhir Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan Praktikum Laboratorium disusun berdasarkan dari hasil kegiatan analisis yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari – 15 April 2023 dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Praktikan melaksanakan kegiatan Praktikum Laboratorium di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Tentunya Praktikan tidak dapat menyelesaikannya laporan ini tanpa dibantu dan di dukung oleh berbagai pihak. Maka dari itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Admiral Nelson Aritonang, Ph. D selaku dosen pembimbing satu dan Rosilawati, S. Sos, MPS. Sp selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan baik secara keilmuan, pengetahuan, administrasi, dan dukungan dalam proses pelaksanaan praktikum;
5. Pemateri dalam pembekalan profil lulusan yang telah memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
6. Teman-teman kelompok 11 Praktikum Laboratorium yang telah bekerjasama dan saling mendukung selama kegiatan Praktikum Laboratorium berlangsung;
7. Orang tua dan keluarga atas dukungan dan doa untuk kesuksesan praktikan selama Praktikum Laboratorium.

Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu praktikan mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap laporan Praktikum Laboratorium

Bandung, 16 April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum 2
a. Tujuan Praktikum 2
b. Manfaat Praktikum 2
C. Waktu dan Lokasi Praktikum 3
D. Proses Praktikum 4
a. Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial 5
b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial 6
c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial 7
d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial 9
e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana 10
E. Sistematika Laporan 12
BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM 13
A. Profil Analisis Jaminan Sosial 13
1. Gambaran Umum Masalah 13
2. Tinjauan Konsep 15
a. Jaminan Sosial 15
b. BPJS Ketenagakerjaan 16
c. Pekerja Sektor Informal 16
d. Pedagang Kaki Lima 17

3. Asemen 18
a. Identifikasi Masalah 18
b. Identifikasi Kebutuhan 21
c. Potensi dan Sumber 21
4. Rencana Intervensi 22
a. Latar Belakang 22
b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 22
c. Bentuk Kegiatan dan Program 23
d. Sistem Partisipan 23
e. Metode dan Teknik 24
f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan 25
g. Analisis Kelayakan Program 26
h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan 27
B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial 29
1. Gambaran Umum Masalah 29
2. Tinjauan Konsep 30
a. Bantuan Sosial 30
b. Tujuan Bantuan Sosial 31
c. Sumber Dana Bantuan Sosial 32
d. Organisasi Said Naum 33
3. Asesmen 33
a. Identifikasi Masalah 33
b. Identifikasi Kebutuhan 35
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 35
4. Rencana Intervensi 36
a. Latar belakang 36
b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 37
c. Bentuk Kegiatan 37
d. Sistem Partisipan 37
e. Metode dan Teknik 38
f. Rancangan Anggaran biaya dan Alat yang Digunakan 38

g. Analisis Kelayakan Program 40
h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan 41
C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial 43
1. Gambaran Umum Masalah 43
2. Tinjauan Konsep 43
a. Pemberdayaan Sosial 43
b. Pengertian Maggot BSF 44
c. Manfaat Maggot BSF 44
d. Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 44
3. Asemen 44
a. Identifikasi Masalah 44
b. Identifikasi Kebutuhan 46
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 47
4. Rencana Intervensi 47
a. Latar Belakang 47
b. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus 48
c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program 48
d. Sistem Partisipan 48
e. Metode dan Teknik 49
f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan 49
g. Analisis Kelayakan Program 51
h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan 52
D. Profil Analisis Penata Lingkungan Sosial 54
1. Gambaran Umum Masalah 54
2. Tinjauan Konsep 55
a. Penataan Lingkungan 55
b. Program Sekolah Hijau 56
c. Tujuan Program Sekolah Hijau 57
d. Bentuk Kegiatan Program Sekolah Hijau 57
e. Manfaat Program Sekolah Hijau 57
3. Asesmen 58

a. Identifikasi Masalah 58
b. Identifikasi Kebutuhan 60
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 60
4. Rencana Intervensi 60
a. Latar Belakang 60
b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 61
c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program 61
d. Sistem Partisipan 61
e. Metode dan Teknik 62
f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan 63
g. Analisis Kelayakan Program 64
h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan 65
E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana 67
1. Gambaran Umum Masalah 67
2. Tinjauan Konsep 68
a. Pengertian Bencana 68
b. Manajemen Penanggulangan Bencana 69
c. Bencana Banjir 70
d. Jenis-jenis Banjir 70
e. Faktor-faktor Penyebab Banjir 71
3. Asemen 71
a. Identifikasi Masalah 71
b. Identifikasi Kebutuhan 73
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 73
4. Rencana Intervensi 73
a. Latar Belakang 73
b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 74
c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program 74
d. Sistem Partisipan 75
e. Metode dan Teknik 75
f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan 76

g. Analisis Kelayakan Program 78
h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan 79
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
1. Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 83
2. Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Identifikasi Masalah Analis Jaminan Sosial 13
Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Analis Jaminan Sosial 23
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Analis Jaminan Sosial..... 25
Tabel 2. 4 Alat yang dibutuhkan Analis Jaminan Sosial 25
Tabel 2. 5 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial..... 26
Tabel 2. 6 Jadwal Kegiatan Analis Jaminan Sosial..... 28
Tabel 2. 7 Sistem Partisipan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 37
Tabel 2. 8 Rencana Anggaran Biaya Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 38
Tabel 2. 9 Alat yang dibutuhkan Analis Sumber Dana Bansos 39
Tabel 2. 10 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bantuan Sosial..... 40
Tabel 2. 11 Jadwal Kegiatan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial..... 42
Tabel 2. 12 Sistem Partisipan Analis Pemberdayaan Sosial 48
Tabel 2. 13 Rancangan Anggaran Biaya Analis Pemberdayaan Sosial 49
Tabel 2. 14 Alat yang dibutuhkan Analis Pemberdayaan Sosial 50
Tabel 2. 15 Analisis SWOT Analis Pemberdayaan Sosial 51
Tabel 2. 16 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial 53
Tabel 2. 17 Sistem Partisipan Analis Penataan Lingkungan Sosial..... 61
Tabel 2. 18 Alat yang dibutuhkan Analis Penataan Lingkungan Sosial 63
Tabel 2. 19 Jadwal Kegiatan Analis Penataan Lingkungan Sosial 66
Tabel 2. 20 Sistem Partisipan Analis Penanggulangan Bencana 75
Tabel 2. 21 Alat yang dibutuhkan Analis Penanggulangan Bencana 77
Tabel 2. 22 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana..... 78
Tabel 2. 23 Jadwal Kegiatan Analis Penanggulangan Bencana 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara mengenai BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal pedagang kaki lima 6
Gambar 2 Wawancara bersama ketua forum RW terkait bantuan sosial yang ada di Desa Soreang 7
Gambar 3 Mengunjungi tempat budidaya maggot di RW 10 9
Gambar 4 Mengunjungi SDN Cibiru terkait penataan lingkungan sekolahnya 10
Gambar 5 Wawancara mengenai informasi titik rawan bencana banjir di Desa Soreang 11
Gambar 6 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial 19
Gambar 7 Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial 34
Gambar 8 Pohon Masalah Analis Pemberdayaan Sosial 45
Gambar 9 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan Sosial 59
Gambar 10 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial 85
Lampiran 2 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 86
Lampiran 3 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial 87
Lampiran 4 Surat Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial 88
Lampiran 5 Surat Pembekalan Peningkatan Analisis Penanggulangan Bencana 89
Lampiran 6 Surat Undangan Lokakarya 90
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian 91
Lampiran 8 Pedoman Observasi Lapangan 92
Lampiran 9 Pedoman Wawancara 93
Lampiran 10 Surat Ijin Praktikum 94

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, namun dikarenakan masih pandemi covid maka kegiatan praktikum lapangan dilakukan secara luring dengan meminta data mengenai permasalahan sosial yang ada di tempat tinggal setempat dan secara daring dengan analisis data sekunder terkait fenomena permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan

sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Praktikum

Praktikum Laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri.
b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang telah dipelajari.
c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
d. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
    1. Pendekatan Awal
    2. Asesmen
    3. Perencanaan Intervensi

b. Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa :

a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan

orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerja sama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri.

b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
f. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
    1. Pendekatan awal
    2. Asesmen
    3. Perencanaan Intervensi
    4. Intervensi
    5. Evaluasi, rujukan, dan terminasi

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum di Desa Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra lapangan :
    a) Pembekalan : 25 Januari – 03 Februari 2023
    b) Pelapasan Praktikan : 8 Februari 2023
2. Lapangan : 08 Februari – 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
    a) Bimbingan Penulisan Laporan : 16 April – 26 April 2023
    b) Pendaftaran Ujian : 27 – 29 April 2023
    c) Ujian Lisan Praktikum : 2 – 3 Mei 2023
    d) Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 03 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1. Tahap Persiapan

   Tahap persiapan merupakan tahap sebelum turun ke lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium pada setiap profilnya, antara lain sebagai berikut:

   a. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

      1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan
      2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan.
      3) Melakukan Praktik, demontrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
         a) Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
         b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
         c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yangterkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
         d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlidungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
      4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

   b. Serah terima praktikan

      Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring di Lapangan Poltekesos Bandung dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum

2. Tahap Lapangan

   Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, ME yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:
   a) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial.
   b) Model jaminan sosial yang digunakan.
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial.
   d) Merancang program jaminan sosial.
   e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial.
   f) Stakeholder terkait program jaminan sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
   a) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia.
   b) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial.
   c) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial.
   d) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial.
   e) Keterampilan
   f) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
   g) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c. Praktik Jaminan Sosial :
   a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.
   b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
   c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
   d) Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial.

Gambar 1 Wawancara mengenai BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal pedagang kaki lima

b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Bapak Tonton Heriyanto, S.Sos yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari, 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi :
   a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.
   b) Model sumber dana bantuan sosial yang digunakan.
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
   d) Merancang program sumber dana bantuan sosial.
   e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial.
   f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial

b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut :
   a) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya.
   b) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial.
   c) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial.
   d) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial.
   e) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial.
   f) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan

sumber dana bantuan sosial.

g) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
h) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
i) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
j) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
k) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial.

c. Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial :

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Sumber dana bantuan sosial
b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
d) Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial.

Gambar 2 Wawancara bersama ketua forum RW terkait bantuan sosial yang ada di Desa Soreang

c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maarif yang dilakukan pada Rabu, 8 Maret 2023. Membahas

tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:

a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial.
b) Model pemberdayaan sosial, yang digunakan.
c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial.
d) Merancang program Pemberdayaan Sosial.
e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial.
f) Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut :

a) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
b) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial.
c) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial.
d) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial.
e) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial.
f) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.
g) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
h) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial.
i) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial.
j) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
k) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial.

c. Praktik Pemberdayaan Sosial

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial.

b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
d) Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan sosial.

Gambar 3 Mengunjungi tempat budidaya maggot di RW 10

d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial oleh Bapak Ade Reno, AKS, MSW, yang dilakukan pada Jumat, 24 Maret 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi :
b. Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut :
   a) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial.
   b) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
   c) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam..
   d) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia.
   e) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem.
   f) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
   g) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial.
   h) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial.

i) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam .
j) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

c. Praktik Penataan Lingkungan Sosial :
   a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Penataan Lingkungan sosial
   b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
   c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
   d) Menyusun laporan praktik analis penataan lingkungan sosial

Gambar 4 Mengunjungi SDN Cibiru terkait penataan lingkungan sekolahnya

e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

a. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Mohd. Robi Amri yang dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi :
   a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana.
   b) Model penanggulangan bencana yang digunakan.
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
   d) Merancang program penanggulangan bencana.
   e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan

bencana.

f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana

b. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

a) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya.
b) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana.
c) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana..
d) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana.
e) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
f) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana.
g) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
h) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi.
i) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana.
j) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana

c. Praktik Penanggulangan Bencana

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana.
b) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder.
c) Menyusun Rencana Intervensi.
d) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana.

Gambar 5 Wawancara mengenai informasi titik rawan bencana banjir di Desa Soreang

E. Sistematika Laporan

Output dari kegiatan praktikum ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini adalah sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan dalam menyusun hasil laporan praktikum

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM

Memuat tentang Profil Analis Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memuat kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditujukkan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

BAB II
PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Pada dasarnya negara Indonesia bagian dari negara welafare state, yang artinya negara menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya dengan melindungi, menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Maka dari itu, sesuai dengan kewajiban negara dalam melindungi dan menjamin kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya, pemerintah membentuk suatu program yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya di sebut JAMSOSTEK adalah suatu bentuk tindakan konkrit pemerintah dalam melindungi para pekerja indonesia dari berbagai bentuk resiko melalui mekanisme jaminan sosial. Terdapat beberapa jenis jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagarkerjaan, diantaranya adalah jaminan kecelekaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada dan mewajibkan perusahaan tersebut untuk mendaftarkan karyawan/pegawai ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat kondisi sosial objektif di Desa Soreang yang merupakan lokasi praktikan selama di lapangan, Desa Soreang merupakan salah satu desa di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung yang dimana mayoritas pekerjaan masyarakat desa sebagai pekerja informal seperti petani, buruh, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan lakukan dengan menggunakan beberapa teknik asesmen pekerja sosial seperti , transect walk, inisiasi sosial dan teknik wawancara kepada para pekerja informal, ditemukan bahwasanya terdapat beberapa hambatan/masalah yang terkait dengan jaminan sosial khususnya pada implementasi daripada Program BPJS Ketenagakerjaan. Berikut beberapa masalah yang praktikan temukan dari hasil wawancara yang telah dilakukan :

Tabel 2. 1 Identifikasi Masalah Analis Jaminan Sosial

No.	Masalah	Dampak	Penyebab
1.	Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan para pekerja home industry konveksi	Memperburuk kesejahteraan pekerja konveksi rumahan apabila terjadi kecelakaan kerja karena	Belum adanya sosialisasi dan pendampingan terkait BPJS Ketenagakerjaan

	desa soreang masih rendah	tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	
2.	Terdapat Lansia Terlantar yang Belum Mendapat Jaminan Kesehatan PBI-JK	Lansia terlantar tidak dapat mengakses layanan kesehatan sehingga rentan terhadap risiko kesehatan jangka panjang	Lansia terlantar belum mengetahui manfaat dan mekanisme bantuan PBI-JK
3.	Terbatasnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan jaminan sosial	Penyandang disabilitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan atau terapi secara rutin	Data kependudukan yang tidak sesuai serta keterbatasan waktu dan finansial yang dimiliki oleh keluarga penyandang disabilitas
4.	Kepesertaan PRSE dalam Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang masih sangat rendah	PRSE tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara optimal	Belum ada sosialisasi langsung dari pihak BPJS kesehatan kepada masyarakat
5.	Rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam program BPJS Ketenagakerjaan	Pedagang kaki lima Rentan terhadap resiko kecelakaan kerja	Kurang pahamnya pedagagang kaki lima mengenai kegunaan BPJS Ketenagakerjaan
6.	Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK)	Fakir Miskin tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan layak dan terjangkau	Tidak terdaftar dalam DTKS
7.	Belum optimalnya manfaat yang	Akuntabilitas program yang belum jelas dan	Belum adanya kepengurusan yang

	dirasakan masyarakat dari adanya program jamsosmas dana sehat	manfaat yang dirasakan tidak optimal	khusus mengelola dana sehat
8.	Rendahnya kepesertaan pekerja sektor informal petani terhadap program BPJS Ketenagakerjaan	Memperburuk kesejahteraan keluarga apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian pada petani	Belum adanya sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan secara langsung

Dari berbagai permasalahan yang praktikan temukan di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan satu fokus dari berbagai permasalahan yang ada. Praktikan tertarik untuk mengambil fokus masalah "Rendahnya Partisipasi Pedagang Kaki lima Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan" untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Tinjauan Konsep

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945 dan dalamnya menyatakan bahwa pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan "Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Sistem jaminan sosial nasional ini dilakukan berdasarkan dengan 3 asas yakni kemanusiaan (menjunjung tinggi harga diri manusia), manfaat (pemberian kebutuhan dasar hidup yang layak), serta keadilan (semua kalangan mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh jaminan sosial) dan berdasarkan 9 prinsip yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,

portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

b. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja. Jenis-jenis anggota BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4, yaitu :

1) Jasa Konstruksi yaitu pekerja yang bekerja di sebuah penyedia layanan berupa konsultasi atas berbagai tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah konstruksi.
2) Penerima Upah (PU) yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan kemudian mendapatkan imbalan dari pihak pemberi kerja. Imbalan tersebut dapat berupa upah, gaji, maupun jenis imbalan yang lain.
3) Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu orang yang memperoleh pendapatan bersumber dari bisnis yang dijalankan sendiri. Beberapa pekerjaan yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya dokter, tukang ojek, pedagang keliling, pengacara, dan lainnya.
4) Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu seorang WNI yang melakukan sebuah pekerjaan di luar negeri, baik akan, sedang, maupun sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program utama yaitu program jaminan hari tua (JHT) yang akan diberikan ketika berusia 56 tahun berdasarkan kontribusi premi, program jaminan pensiun (JP) yang akan diberikan ketika mengalami pendiun baik itu karena cacat, usia, meninggal, maupun mutasi tetap ke luar negeri. Lalu ada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang diberikan dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kemungkinan risiko pekerjaan berupa kecelakaan kerja. Kemudian ada program jaminan kematian (JKM) yang akan diberikan ketika peserta meninggal dunia dan akan diberikan kepada ahli waris.

c. Pekerja Sektor Informal

Pekerja sektor informal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja, artinya tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai aktifitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi

formal. Contoh dari pekerja sektor informal yaitu petani, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Dalam jurnal Analisa Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Formal dan Sektor Informal di Jawa Timur (2014) karya Yupi Kurniawan Sutopo dan R.R. Retno Ardianti, ekonomi sektor informal memiliki delapan ciri utama, yaitu:

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik.
2) Karena kelompok usahanya tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang berbentuk formal, biasanya kelompok usaha yang tergolong dalam sektor informal, tidak memiliki izin resmi.
3) Pola kegiatan usahanya tidak teratur dengan baik. Mulai dari lokasi hingga jam kerjanya.
4) Unit usaha yang dilakukan sering berganti dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya.
5) Umumnya teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih bersifat tradisional atau sederhana.
6) Skala operasi kegiatan sektor informal tergolong kecil karena modal dan perputaran usahanya cenderung minim.
7) Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan kegiatan usahanya karena sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari pengalaman saat bekerja.
8) Modalnya berasal dari tabungan atau lembaga keuangan tidak resmi.

d. Pedagang Kaki Lima

PKL atau pedagang kaki lima merupakan para pedagang yang tidak memiliki lokasi tetap, dan biasanya menggelar dagangannya di trotoar atau pinggir jalan raya menggunakan gerobak. Pedagang kaki lima ini masuk dalam sektor informal

Pedagang kaki lima sering dipermasalahan karena keberadaannya sering mengganggu lalu lintas bahkan juga mencemari lingkungan karena memanfaatkan sungai atau saluran air untuk membuang sampah.

Ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Kartono, dkk.:

1. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
2. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya mejual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil

3. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
5. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
6. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
7. Umunya pedagang kaki lima merupakan usaha "familt enterprise", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
8. Mempunyai sifat "one man enterprise", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
9. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
10. Sebagian pedagang kaki lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
11. Pedagang kaki lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
12. Anggapan bahwa para pedagang kaki lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat

3. Asemen

a. Identifikasi Masalah

Dalam hal mendalami fokus masalah yang praktikan ambil yaitu masalah "Rendahnya Partisipasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan". Praktikan mengambil informasi kepada para pedagang kaki lima yang ada di Desa Soreang melaui teknik wawancara dengan mengunjungi beberapa lapak pedagang tersebut Dari wawancara yang praktikan lakukan dengan beberapa pedagang kaki lima yang ada di Desa Soreang, didapatkan hasil sebagai berikut:

1) Ada dari mereka yang tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena kurang mengetahui ataupun kurang paham tentang kegunaannya
2) Ada salah satu dari mereka tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena merasa tidak memerlukan, karena menurutnya daripada uang mereka digunakan untuk membayar kepesertaan tiap bulannya, lebih baik ditabung sendiri untuk keperluan yang lain
3) Kemudian juga ada salah satu dari mereka yang tidak mengikuti BPJS Ketenagakerjaan karena belum pernah mendapatkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal karena minimnya sosialisasi.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi pedagang kaki lima dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat dikatakan masih rendah. Kendala-kendala pedagang kaki lima di Desa Soreang mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut muncul karena upaya-upaya atau program yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya upaya umum untuk semua kalangan tenaga kerja formal, bukan upaya yang dikhususkan dan disesuaikan untuk pedagang kaki lima.

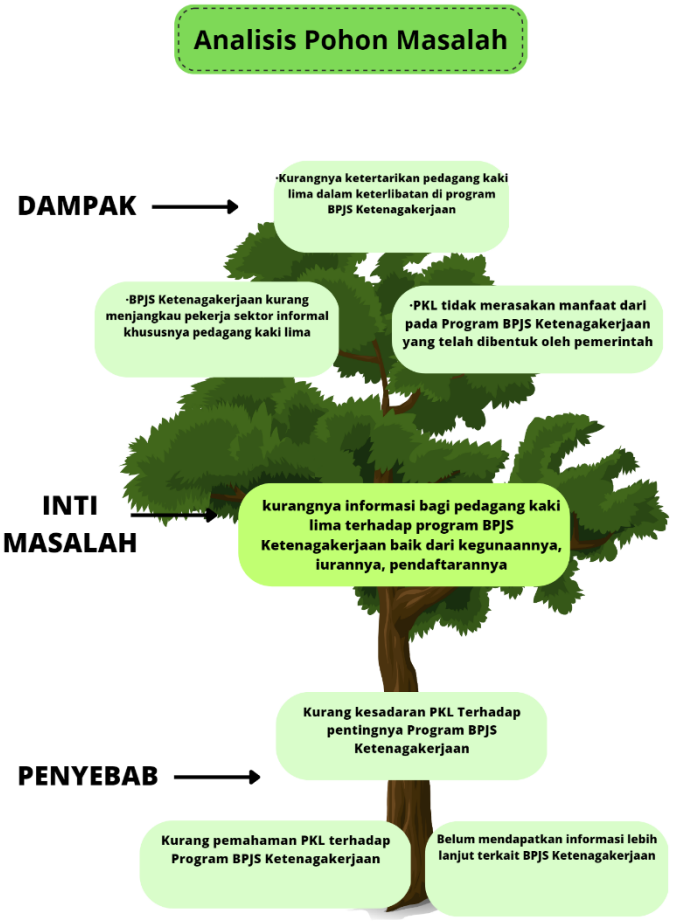

1) Analisis Pohon Masalah

Berikut analisis pohon masalah berasarkan hasil identifikasi masalah tersebut:

Gambar 6 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial

2) Penyebab Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

1) Kurang kesadaran PKL Terhadap pentingnya Program BPJS Ketenagakerjaan.

   Hal ini dikarenakan banyak PKL yang menyangka bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak perlu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan karena masih tergolong pekerjaan yang mudah dilakukan dan minim dari risiko kecelakaan kerja.

2) Kurang pemahaman PKL terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan

   Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Desa Soreang ataupun stakeholder setempat, sehingga PKL kurang memahami manfaat yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan.

3) Belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait BPJS Ketenagakerjaan

   Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan umumnya kepada perusahaan yang memiliki tenaga kerja di sektor formal dan pihak BPJS Ketenagakerjaan kurang memperhatikan pekerja sektor informal dalam memperoleh manfaat dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

3) Dampak Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah sebagai berikut:

1) PKL tidak merasakan manfaat dari pada Program BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibentuk oleh pemerintah

   Hal ini disebabkan karena informasi yang diterima oleh PKL terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal.

2) BPJS Ketenagakerjaan kurang menjangkau pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima

   Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi lebih dalam terhadap pekerja di sektor informal sehingga informasi yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan hanya diperoleh orang pekerja formal di perusahaan.

3) Kurangnya ketertarikan pedagang kaki lima dalam keterlibatan di program BPJS Ketenagakerjaan

   Hal ini dikarenakan kesadaran terhadap resiko kecelakaan kerja yang dimiliki disaat mereka melakukan pekerjaan, padahal pada nyatanya setiap pekerjaan tentu memiliki resiko kecelakaan kerja sehingga

perlu adanya perlindungan diri dan keluarga melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini.

4) Fokus Masalah

Fokus masalah dari pembahasan ini adalah kurangnya informasi bagi pedagang kaki lima terhadap program BPJS Ketenagakerjaan baik dari kegunaannya, iurannya, pendaftarannya karena minimnya informasi yang mereka dapatkan sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil identifikasi dan tinjauan langsung ke lapangan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu

1) Kebutuhan akan peningkatan pemahaman dan informasi dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan
2) Kebutuhan akan informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan seperti suatu jaminan agar terhidar dari risiko kecelakaan kerja
3) Kebutuhan akan peningkatan kesadaran pedagang kaki lima tentang pentingnya mendukung program pemerintah melalui keterlibatan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal.

c. Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Desa Soreang:

1) Sistem Sumber Formal
   a) Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
      Dalam rencana intervensi, Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai edukator dan *support system* bagi target sasaran untuk meningkatkan partisipasi mereka.
   b) Pihak BPJS Ketenagakerjaan
      Pihak perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dalam rencana intervensi berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi kepada pekerja informal khususnya target sasaran yaitu pedagang kaki lima dalam kepesertaan dan manfaat yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.
2) Sistem Sumber Infromal
   a) Keluarga
      Keluarga sebagai *support system* bagi target sasaran agar mau berpartisipasi dalam rencana intervensi yang dilaksanakan.
   b) Teman

Sama halnya dengan keluarga, peran teman juga sebagai support system bagi target sasaran agar mau berpartisipasi dalam rencana intervensi yang dilaksanakan.

c) Tetangga

Tetangga khususnya yang memahami terkait program BPJS Ketenagakerjaan ini berperan sebagai pemberi infomasi atau edukator terhadap target sasaran sehingga mereka paham akan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Jaminan sosial adalah hak setiap orang, baik itu berupa jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Dari hasil asesmen yang menyasar pedagang kaki lima di Desa Soreang, terdapat permasalahan dimana dalam program BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan mereka masih sangat rendah bahkan hampir seluruh pedagang kaki lima belum terdaftar pada jaminan ketenagakerjaan ini. Penting bagi mereka sebagai komponen bukan penerima upah (BPU) untuk memiliki jaminan tersebut.

Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima tentang BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran sehingga mereka menganggap tidak memerlukan BPJS Ketenagakerjaan, dan pedagang kaki lima belum mendapatkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal.

Mereka tidak terlalu mengetahui bagaimana mekanisme serta skema program BPJS Ketenagakerjaan yang akan didapatkan ketika sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena upaya-upaya atau program yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya upaya umum untuk semua kalangan tenaga kerja formal, bukan upaya yang dikhususkan dan disesuaikan untuk pedagang kaki lima

Dilihat dari penyebab permasalahannya, maka dapat disimpulkan bahwa mereka memerlukan sebuah program pendampingan melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja sektor informal yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pekerja sektor informal khususnya pedagang kaki lima mengenai BPJS Ketenagakerjaan serta menumbuhkan kesadaran berbagai pihak khususnya pedagang kaki lima untuk mengikuti dan mentaati persyaratan dalam menjadi

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Mengantisipasi rendahnya tingkat kesejahteraan pedagang kaki lima apabila terjadi suatu kecelakaan kerja, terkena resiko sosial, ataupun kematian
2) Pekerja sektor informal yaitu pedagang kaki lima segera mengajukan pendaftaran diri untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
3) Meningkatkan angka partisipasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang khususnya kepada pekerja sektor informal pedagang kaki lima.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya informasi bagi pedagang kaki lima terhadap program BPJS Ketenagakerjaan baik dari kegunaannya, iurannya, pendaftarannya karena minimnya informasi yang mereka dapatkan sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah edukasi kepada pedagang kaki lima dan fasilitasi pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan untuk pedagang kaki lima secara daring.

Program yang akan dilaksanakan yaitu "PEKA BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima" yang merupakan singkatan dari Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pedagang Kaki Lima di Desa Soreang.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana intervensi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Analis Jaminan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	1) Pekerja sosial 2) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 3) BPJS Ketenagakerjaan
3.	Client System	Pekerja Informal Desa Soreang
4.	Support System	1) Kepala Desa Soreang 2) BPJS Ketenagakerjaan 3) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
5.	Controling System	Pekerja Sosial
6.	Implementing System	1) Pekerja sosial 2) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung

		3) BPJS Ketenagakerjaan
7.	Target System	Warga Desa Soreang
8.	Action System	1. Pekerja Sosial 2. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung 3. BPJS Ketenagakerjaan

e. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "PEKA BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima" yang merupakan singkatan dari Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pedagang Kaki Lima di Desa Soreang metode yang akan digunakan adalah *Community Organization* dan *Community Development* (COCD) yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, proyek, atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun teknik yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu:

1) Penyuluhan

   Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

2) Fasilitasi

   Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan. Pekerja sosial akan membantu masyarakat dan memfasilitasi proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online. Strategi yang digunakan adalah strategi kolaborasi dan kampanye, dimana pekerja sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat sistem sasaran setuju dengan sistem kegiatan, bahwa perubahan dibutuhkan dan di dukung pengalokasian sumber. Adapun taktik yang digunakan yaitu implementasi dan edukasi

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan

Berikut rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan program nantinya :

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Analis Jaminan Sosial

No.	Uraian	Qty.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	**Administrasi**				
	Proposal Pengajuan	50	lembar	Rp 1.000	Rp 50.000
	Surat Menyurat	50	lembar	Rp 1.000	Rp 50.000
Total 1					**Rp 100.000**
2	**Logistik**				
	Banner 3 x 1 m	1	buah	Rp 60.000	Rp 60.000
Total 2					**Rp 60.000**
3	**Honorarium**				
	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung	1	orang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	BPJS Ketenagakerjaan	1	orang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Total 3					**Rp 2.000.000**
4	**Konsumsi**				
	Snack Narasumber	2	orang	Rp 10.000	Rp 20.000
	Snack Panitia	10	orang	Rp 10.000	Rp 100.000
	Snack Perwakilan Perangkat Desa	3	orang	Rp 10.000	Rp 30.000
	Makan Siang Narasumber	2	orang	Rp 20.000	Rp 40.000
	Makan Siang Panitia	10	orang	Rp 20.000	Rp 200.000
	Makan Siang Perwakilan Perangkat Desa	3	orang	Rp 20.000	Rp 60.000
Total 4					**Rp 450.000**
Total Keseluruhan					**Rp 2.610.000**

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Alat yang dibutuhkan Analis Jaminan Sosial

Nama Keperluan	Volume	Satuan

Laptop	2	Buah
Banner	1	Buah
ATK	1	Paket

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan Analisis SWOT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Strenght :** 1. Adanya narasumber yang tepat 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Sikap terbuka dari partisipan	**Weakness :** 1. Ada kemungkinan peserta tidak memahami atau tidak menyimak materi yang disampaikan 2. Tidak semua partispasi hadir ke dalam kegiatan
Oppurtunities : 1. Dapat meningkatkan partispasi warga serta pekerja informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan 2. Pekerja informal merasakan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan 3. Mendukung pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan	**Strategi SO :** 1. Melakukan pendampingan kepada warga serta pekerja informal dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan	**Strategi WO :** 1. Penyampaian sosialisasi yang dikemas dengan menarik dan menggunakan gaya komunikasi diskusi atau dua arah 2. Menggunakan bahasa daerah dalam penyampaiannya
Threat : 1. Tidak terlaksananya program “Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk	**Strategi ST :** 1. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dari jauh hari dan tidak dadakan 2. Membuat promosi kegiatan dengan design yang menarik	**Strategi WT :** 1. Membuat acara yang efektif dan efisien

Pedagang Kaki Lima di Desa Soreang”	3. Membuat doorprize dalam kegiatan serta diselingi dengan bermain game	

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program “PEKA BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima” yang merupakan singkatan dari Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pedagang Kaki Lima di Desa Soreang dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta narasumber yang informatif serta responsif terhadap permasalahan yang dibahas.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Daerah setempat di Desa Soreang serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Soreang khususnya pedagang kaki lima dalam pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat mampu memperoleh pengetahuan dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya dua, adanya kemungkinan peserta yang merupakan pedagang kaki lima tidak memahami materi yang disampaikan dan sebagain tidak bisa hadir dalam kegiatan. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa “PEKA BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima” yang merupakan singkatan dari Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pedagang Kaki Lima di Desa Soreang layak dilaksanakan.

h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

1) Langkah-Langkah Pelaksanaan

Berikut langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

a. Pra pelaksana
   a) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
   b) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
   c) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
   d) Praktikan mengundang Pihak Dinas Ketenagkerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Desa Soreang, dan Pekerja Sosial Masyarakat
b. Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh kepala Desa Soreang
   b) Pembacaan Doa oleh Praktikan

c) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial Masyarakat sekaligus menyampailan maksud dan tujuan kegiatan
d) Pemberian materi terkait tenaga kerja dan jaminan yang diberikan
e) Pemberian materi terkait pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
f) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal melalui pendaftaran online
g) Penutup

c. Pasca Pelaksanaan
   a) Pendampingan
   b) Monitoring dan Evaluasi
   c) Dokumentasi Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal kegiatan pelaksanaan program:

Tabel 2. 6 Jadwal Kegiatan Analis Jaminan Sosial

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Kepala Desa	Sie. Humas	Sambutan Oleh kepala Desa Soreang
2.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
3.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Tenaga Kerja dan Jaminan yang diberikan Pemateri : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung

9.	10.00 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Pemateri : Kader BPJS Ketenagakerjaan
10.	12.00 - 13.00	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
11.	13.0 - 14.00	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan kepada Pekerja sektor informal	Sie. Acara	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online dan dipandu langsung oleh pekerja sosial
12.	14.00-14.15	Penutup	Sie. Acara	-

B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, kelompok ataupun masyarakat agar menciptakan kondisi yang sejahtera. Program bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh lembaga sosial masyarakat maupun perusahaan swasta yang ada dalam bentuk program maupun kegiatan charity/penggalangan dana. Terdapat 3 model sumber dana bantuan sosial. Pertama, Model dana yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah melalui APBN/APBD dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kedua, dana bantuan sosial yang bersumber dari Bantuan/Hibah Luar Negeri. Negara melalui pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema *Government to Government* (Pemerintah negara lain kepada pemerintah pusat/daerah) atau *Private to Government* (Swasta/Masyarakat/Organisasi luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah) atau *Private to Private* (Swasta/Masyarakat/Organisasi luar negeri kepada Swasta/Masyarakat/Organisasi dalam negeri). Dan yang ketiga, dana bantuan

sosial yang bersumber dari Dana Hibah, Sumbangan (Pengumpulan uang dan barang), dan Undian (Pajak Undian Berhadiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di Desa Soreang. Ternyata terdapat salah satu perkumpulan bernama Said Naum yang merupakan perkumpulan para pengusaha dan pedagang konveksi di Soreang yang berjualan ke Tanah Abang. Dalam keberadaannya di Desa Soreang, mereka memiliki *mindset* bahwa mereka mencari rezeki di Desa Soreang, mereka juga harus memberikan timbal balik kepada Desa Soreang sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat pengumpulan dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya Desa Soreang.

Namun, dalam pengelolaannya tersebut masih terkendala dengan kesibukan mereka dalam mengelola bisnis konveksinya. Program bantuan yang dicanangkan oleh Said Naum ini belum terstruktur dengan baik. Mereka belum memiliki inisiatif murni untuk program mereka. Jadi, dapat dikatakan bantuan sosial dari Said Naum ini masih belum optimal dalam pengelolaannya karena terbentur kesibukan mereka dengan bisnisnya. Contohnya, jika ada yang membutuhkan bantuan langsung saja mengajukan langsung kepada mereka, nantinya akan diberikan asalkan bantuan yang diajukan tersebut benar-benar untuk kebaikan Desa Soreang.

Dari wawancara yang praktikan lakukan di lapangan, didapatkan informasi bahwa bentuk bantuan yang sudah pernah diberikan Said Naum adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sebidang tanah untuk pembangunan bank sampah di RW 10.
2. Membantu pembelian tanah yang kemudian diwakafkan untuk TPU.
3. Dalam pemberian bantuan yang spesifik ke masyarakat mereka juga memberikan bantuan kepada yang ekonominya kurang mampu.
4. Menyediakan bantuan sembako gratis untuk kaum dhuafa.
5. Saat pandemi *Covid-19* Said Naum bersinergi membuat kegiatan bernama peduli warga yang dilakukan dengan pemberian donasi.

2. Tinjauan Konsep

a. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah merupakan bantuan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang

pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Menurut Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan, Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

b. Tujuan Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga. Pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dariguncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
3) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatanpencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

c. Sumber Dana Bantuan Sosial

Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) ada 3 yaitu bersumber dari masyarakat, dana hibah, dan negara antara lain :

1) Negara

Pemerintah mengelola bantuan sosial yang bersumber dari pajak melalui APBN/APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengumpulan uang dan barang serta pengelolaan pajak undian yang dituangkan dalam bentuk Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana bantuan sosial yang bersumber dari Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pajak yang dituangkan dalam APBN/APBD dan UKS. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari negara antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.

2) Hibah Luar Negeri

Negara melalui Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema Government to Government (Pemerintah Negara lain kepada pemerintah pusat/daerah), atau Private to Government (Swasta/masyarakat/organisasi dari luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah), atau skema Private to Private (Masyarakat/swasta/organisasi luar negeri kepada swasta/masyarakat/organisasi dalam negeri) Pelaksanaan bantuan sosial dari luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Tidak untuk mendanai terorisme, radikalisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan bantuan dari luar negeri harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Masyarakat

Sesuai prinsip kesetiakawanan sosial bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, salah satu wujud peran serta masyarakat yaitu pemberian sumbangan sosial berupa uang atau barang bagi perorangan atau kelompok dengan tujuan agar dana yang terkumpul dapat membantu penanganan permasalahan sosial. Usaha pengumpulan sumbangan sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan

sumbangan. Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan sosial adalah pertanggungjawaban terhadap sumbangan sosial yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengumpulan uang dan barang baik secara teknis maupun administratif. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari masyarakat antara lain diperoleh dari kedermawanan orang; Lembaga sosial (rumah zakat, rumah yatim, Baznaz, kita bisa.com); dana hibah seperti sumbangan (pengumpulan uang dan barang) dan undian (pajak undian berhadiah); dana berdasarkan kearifan lokal (beas perelek, rereongan sarumpi, beas jimpitan, serikat tolong menolong).

d. Organisasi Said Naum

Organisasi Said Naum merupakan wadah atau perkumpulan pengusaha konveksi di Desa Soreang yang berdagang ke Tanah Abang. Produk dari Desa Soreang ini menjadi populer di Tanah Abang. Sehingga saat ini banyak pengusaha yang melebarkan sayapnya untuk bergabung di Organisasi Said Naum untuk menjual produknya di Tanah Abang.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di Desa Soreang. Ternyata terdapat salah satu perkumpulan bernama Said Naum yang merupakan perkumpulan para pengusaha dan pedagang konveksi di Soreang yang berjualan ke Tanah Abang. Dalam keberadaannya di Desa Soreang, mereka memiliki *mindset* bahwa mereka mencari rezeki di Desa Soreang, mereka juga harus memberikan timbal balik kepada Desa Soreang sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat pengumpulan dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya Desa Soreang.

Namun, dalam pengelolaannya tersebut masih terkendala dengan kesibukan mereka dalam mengelola bisnis konveksinya. Program bantuan yang dicanangkan oleh Said Naum ini belum terstruktur dengan baik. Mereka belum memiliki inisiatif murni untuk program mereka. Jadi, dapat dikatakan bantuan sosial dari Said Naum ini masih belum optimal dalam pengelolaannya karena terbentur kesibukan mereka dengan bisnisnya. Contohnya, jika ada yang membutuhkan bantuan langsung saja mengajukan langsung kepada mereka, nantinya akan diberikan asalkan bantuan yang diajukan tersebut benar-benar untuk kebaikan Desa Soreang.

1) Analisis Pohon Masalah

Berikut analisis pohon masalah yang dijabarkan dari hasil identifikasi masalah tersebut:

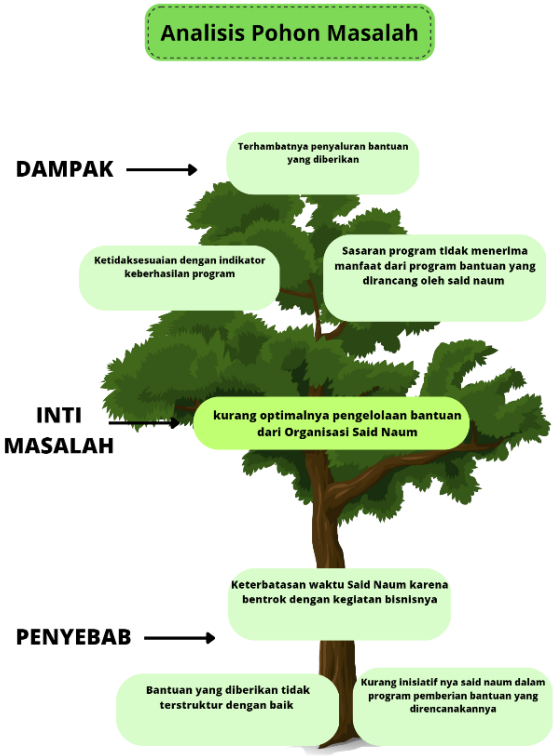

2) Penyebab Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan waktu Said Naum karena bentrok dengan kegiatan bisnisnya

   Hal ini dikarenakan manajemen waktu yang kurang maksimal dari organisasi atau perkumpulan pedagang koveksi ini sehingga program bantuan tidak berjalan dengan baik.

2) Bantuan yang diberikan tidak terstruktur dengan baik

   Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar pengurus sehingga informasi terkait bantuan yang diberikan pun tidak terstruktur dan kurang tepat sasaran.

3) Kurangnya inisiatif Said Naum dalam program pemberian bantuan yang direncanakannya

Gambar 7 Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial

Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terlibat terhadap waktu bekerja yang mereka miliki sehingga berdampak pada program pemberian bantuan.

3) Dampak Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

1) Terhambatnya penyaluran bantuan yang diberikan
   Hal ini diakibatkan karena kurang baiknya manajemen baik itu waktu maupun pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dalam pelaksanaan program.
2) Sasaran program tidak menerima manfaat dari program bantuan yang dirancang oleh Said Naum
   Sehingga target sasaran merasa program yang dilaksanakan tidak efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan.
3) Ketidaksesuaian dengan indikator keberhasilan program
   Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan di lapangan sehingga indikator keberhasilan dari program ini tidak tercapai seperti yang diharapkan

4) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka fokus masalah yang praktikan ambil yaitu kurang optimalnya pengelolaan bantuan dari Organisasi Said Naum. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil identifikasi masalah dan wawancara langsung ke lapangan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

1) Kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam pengelolaan program yang baik karena pengelolaan program ini berdampak pada target sasaran.
2) Kebutuhan akan pembentukan tim penanggung jawab program serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program.
3) Kebutuhan akan pelatihan dalam peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya manusia yang terlibat dalam tim penanggung jawab program.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Desa Soreang:

1) Karang Taruna

Dalam realisasi rencana intervensi organisasi karang taruna dapat membantu Said Naum dalam pendistribusian bantuan yang akan diberikan kepada warga sasaran program.

2) Tokoh masyarakat
   Dalam hal ini tokoh masyarakat dapat menjadi fasilitator dan tim penanggung jawab daripada program bantuan yang dirancang oleh Said Naum.
3) Kepala Desa Soreang
   Dalam rencana intervensi, kepala Desa Soreang bisa berperan sebagai pengawas program dan target sasaran dari program yang dijalankan serta sebagai evaluator dari pelaksanaan program.

4. Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di Desa Soreang. Ternyata terdapat salah satu perkumpulan bernama Said Naum yang merupakan perkumpulan para pengusaha dan pedagang konveksi di Soreang yang berjualan ke Tanah Abang. Dalam keberadaannya di Desa Soreang, mereka memiliki *mindset* bahwa mereka mencari rezeki di Desa Soreang, mereka juga harus memberikan timbal balik kepada Desa Soreang sendiri. Oleh karena itu, mereka membuat pengumpulan dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya Desa Soreang.

Namun, dalam pengelolaannya tersebut masih terkendala dengan kesibukan mereka dalam mengelola bisnis konveksinya. Program bantuan yang dicanangkan oleh Said Naum ini belum terstruktur dengan baik. Mereka belum memiliki inisiatif murni untuk program mereka. Jadi, dapat dikatakan bantuan sosial dari Said Naum ini masih belum optimal dalam pengelolaannya karena terbentur kesibukan mereka dengan bisnisnya. Contohnya, jika ada yang membutuhkan bantuan langsung saja mengajukan langsung kepada mereka, nantinya akan diberikan asalkan bantuan yang diajukan tersebut benar-benar untuk kebaikan Desa Soreang.

Maka dari itu dari, berangkat dari permasalahan yang praktikan temukan di lapangan. praktikan berinisiatif untuk membuat rencana intervensi sebagai alternatif solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Rencana intervensi yang diberikan nantinya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas said naum dalam pengelolaan program bantuan yang telah dirancang sebelumnya.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini yaitu memaksimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan program bantuan yang telah dirancang sebelumnya dengan meningkatkan kapasitas said naum dalam hal manajemen organisasi. Adapun tujuan khusus kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman kepada said naum tentang pengelolaan ataupun manajemen yang baik dan benar
2) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam setiap pelaksanaan program
3) Membentuk tim tambahan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program yang dijalankan

c. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang optimalnya pengelolaan bantuan dari Organisasi Said Naum dengan memberikan pengetahuan dan edukasi kepada said naum dalam bentuk sosialisasi tentang bagaimana cara pengelolaan program yang terstruktur dengan efektif dan efisien.

Program yang akan dilaksanakan yaitu "Sosialisasi Efektivitas dalam Manajemen Program" berupa peningkatan kapasitas Said Naum dalam pengelolaan program bantuan.

d. Sistem Partisipan

Adapun sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

Tabel 2. 7 Sistem Partisipan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	Pekerja sosial
3.	Client System	Said Naum Desa Soreang
4.	Support System	1) Kepala Desa Soreang 2) Karang Taruna
5.	Controling System	Pekerja Sosial
6.	Implementing System	Pekerja sosial
7.	Target System	Said naum Desa Soreang
8.	Action System	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau "*Community Organization* dan *Community Development*", yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Kelompok Said Naum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, dan dapat memanfaatkan potensi sumber di lingkungan. adapun teknik yang digunakan oleh praktikan sebagai berikut :

1) Penyuluh Sosial
   Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri. Dalam hal ini penyuluhan dilakukan dengan Peningkatan kapasitas kemampuan said naum dalam pengelolaan program.
2) *Capacity Building*
   Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk menunjang kegiatan di masyarakat dengan melaksanakan kelas praktik dan bimbingan bersama *Fundriser* berpengalaman di bidangnya.

f. Rancangan Anggaran biaya dan Alat yang Digunakan

Berikut rincian anggaran dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan program :

Tabel 2. 8 Rencana Anggaran Biaya Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Konsumsi				

	Snack peserta	30	Box	10.000,00	300.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah II				400.000,00
	Jumlah Keseluruhan				975.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Alat yang dibutuhkan Analis Sumber Dana Bansos

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	1	Buah
Sofa	1	Set
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
ATK	1	Paket
Kursi	20	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program dengan menggunakan teknik analisis SWOT:

Tabel 2. 10 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Strenght** : 1. Bekerja sama dengan organisasi sosial 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Partisipan mempunyai antusias yang tinggi	**Weakness :** 1. Tidak semua partisipan hadir ke dalam kegiatan
Oppurtunities : 1. Meningkatnya kapasistas pengetahuan said naum dalam hal pengelolaan 2. Membantu kelancaran program bantuan said naum 3. Menciptakan program bantuan said naum yang sustainable	**Strategi SO :** 1. Melakukan kolaborasi dengan pihak pihak terkait dalam setiap pelaksanaan program 2. Pembentukan tim tambahan	**Strategi WO :** 1. Penyampaian sosialisasi yang dikemas dengan menarik dan menggunakan gaya komunikasi diskusi atau dua arah
Threat : 1. Tidak terlaksananya kegiatan yang efektif 2. Terjadinya kendala di luar rencana dalam kegiatan yang dilaksanakan	**Strategi ST :** 1. Membuat jadwal rancangan kegiatan 2. Membuat solusi alternatif dalam menangani suatu kendala	**Strategi WT :** 1. Melakukan Monitoring selama kegiatan dan Evaluasi dari setiap hasil kegiatan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Sosialisasi Efektivitas dalam Manajemen Program dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa antusias peserta yang tinggi dan adanya

dukungan dari pemerintah setempat dalam pelaksanaan program membuat program ini memperoleh respon positif dari masyarakat.

Kemudian kegiatan ini juga mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman Said Naum sehingga pelaksanaan program mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi target sasaran.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu yaitu tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam program yang akan dilaksanakan. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Sosialisasi Efektivitas dalam Manajemen Program layak dilaksanakan.

h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

1) Langkah-Langkah Pelaksanaan

Berikut langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

a. Pra pelaksana
   a) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
   b) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
   c) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
   d) Praktikan mengundang Kepala desa, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat
b. Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh kepala Desa Soreang
   b) Pembacaan Doa oleh Praktikan
   c) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial Masyarakat sekaligus menyampailan maksud dan tujuan kegiatan
   d) Pemberian materi terkait teori manajemen
   e) Pembentukan tim tambahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dengan melibatkan karang taruna di dalamnya
   f) Penutup
c. Pasca Pelaksanaan
   a) Pendampingan
   b) Monitoring dan Evaluasi
   c) Dokumentasi Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 2. 11 Jadwal Kegiatan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Kepala Desa	Sie. Humas	Sambutan Oleh kepala Desa Soreang
2.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
3.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Teori Manajemen Pemateri : Pekerja sosial masyarakat
10.	12.00 - 13.00	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
11.	13.0 - 14.00	Pembentukan tim tambahan	Sie. Acara	Pembentukan tim tambahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dengan melibatkan karang taruna di dalamnya Pemandu : Pekerja Sosial
12.	14.00-14.15	Penutup	Sie. Acara	-

C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di lapangan bahwasanya di RW 10 Desa Soreang terdapat suatu kegiatan pengelolaan sampah organik yang dilakukan oleh pemulung. Dalam kehidupannya, pemulung tersebut mengumpulkan dan memilahkan sampah organik di tempat bank sampah yang ada di RW 10 yang kemudian nantinya hasil daripada pemilahan sampah organik tersebut akan diurai untuk jadi pakan maggot. Maggot sendiri merupakan larva yang mempunyai kemampuan untuk mengurai limbah organik. Maggot akan tumbuh dan berkembang melalui sampah organik tersebut. Pemanfaatan sampah organik melalui budidaya maggot diketahui terdapat banyak sekali manfaat yang diperoleh, seperti misalnya hasil dari maggot ini dapat perjual belikan sebagai pakan hewan ternak.

Untuk kegiatan budidaya maggot ini, sebelumnya memang telah berjalan di RW 10 dan terdapat mentor yang mendampingi dan melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya manfaat dari hasil kegiatan budidaya maggot ini telah menghasilkan nilai ekonomis bagi pemulung tersebut. Namun dengan demikian, melihat kondisi sosial objektif di RW 10, cakupan pemberdayaan melalui budidaya maggot ini masih belum terlalu luas. Artinya kegiatan yang dilakukan belum melibatkan warga yang memang perlu diberdayakan, atau dengan kata lain warga yang masuk dengan kriteria PPKS (Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

2. Tinjauan Konsep

a. Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

b. Pengertian Maggot BSF

Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF) sehingga sering disebut maggot BSF. Lalat BSF sendiri memiliki nama latin Hermetia illucens. Bentuknya mirip ulat, berbuku dengan ukuran larva dewasa 15-22 mm dan berwarna coklat. Siklus hidup lalat BSF kurang lebih selama 40-43 hari. Larva/maggot BSF bertahan selama 14-18 hari sebelum bermetamorfosis menjadi pupa dan lalat dewasa. Sumber: Asumsi Youtobe Channel Maggot atau Larva dari Black Soldier Fly (BSF) Berbeda dengan jenis lalat pada umumnya seperti lalat rumah dan lalat hijau yang dicap sebagai agen penyakit, lalat BSF ini tidak menimbulkan bau busuk dan bukan pembawa sumber penyakit karena dalam tubuh BSF mengandung zat antibiotik alami. Lalat hijau biasanya hinggap di tempat yang kotor, namun lalat BSF ini hanya hinggap di tempat yang berbahan fermentasi.

c. Manfaat Maggot BSF

Maggot BSF dimanfaatkan dan dijual dalam bentuk maggot segar, maggot kering, telur dari lalat BSF dan produk turunannya seperti tepung maggot, pellet magot, prebiotik serta pupuk organik. Maggot mengandung protein tinggi yaitu sekitar 30-45% sehingga sangat cocok dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ikan, burung dan hewan ternak lainnya. Pupuk organik sebagai produk turunan dari maggot berfungsi sebagai kondisioner tanah atau untuk revitalisasi.

d. Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Terdapat 26 jenis PMKS, diantaranya adalah anak terlantar, lanjut usia terlantar dan lain sebagainya.

3. Asemen

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di lapangan bahwasanya di RW 10 Desa Soreang terdapat suatu kegiatan pengelolaan sampah organik yang dilakukan oleh pemulung. Dalam kehidupannya, pemulung tersebut mengumpulkan dan memilahkan sampah organik di tempat bank sampah yang ada di RW 10 yang kemudian nantinya hasil daripada pemilahan sampah organik tersebut akan diurai untuk jadi pakan maggot. Maggot sendiri merupakan larva yang mempunyai kemampuan untuk mengurai

limbah organik. Maggot akan tumbuh dan berkembang melalui sampah organik tersebut. Pemanfaatan sampah organik melalui budidaya maggot diketahui terdapat banyak sekali manfaat yang diperoleh, seperti misalnya hasil dari maggot ini dapat perjual belikan sebagai pakan hewan ternak.

Untuk kegiatan budidaya maggot ini, sebelumnya memang telah berjalan di RW 10 dan terdapat mentor yang mendampingi dan melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya manfaat dari hasil kegiatan budidaya maggot ini telah menghasilkan nilai ekonomis bagi pemulung tersebut. Namun dengan demikian, melihat kondisi sosial objektif di RW 10, cakupan pemberdayaan melalui budidaya maggot ini masih belum terlalu luas. Artinya kegiatan yang dilakukan belum melibatkan warga yang memang perlu diberdayakan, atau dengan kata lain warga yang masuk dengan kriteria PPKS (Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

1) Analisis Pohon Masalah

Berikut analisis masalah yang praktikan lakukan dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah:

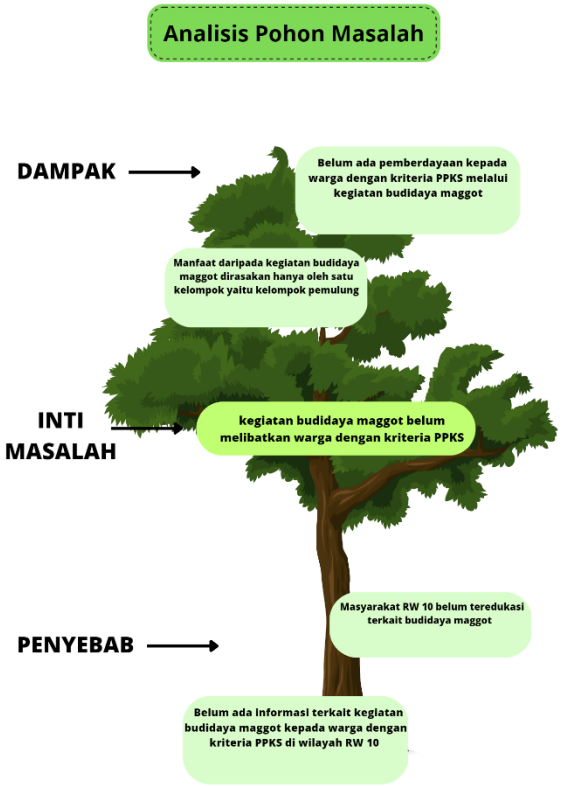

Gambar 8 Pohon Masalah Analis Pemberdayaan Sosial

2) Penyebab masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

1) Belum ada informasi terkait kegiatan budidaya maggot kepada warga dengan kriteria PPKS di wilayah RW 10
   Hal ini dikarenakan informasi yang disebarluaskan belum menjangkau masyarakat kriteria PPKS karena dinilai kurang efektif dan maksimal dalam melakukan budidayanya terkait keterampilan yang mereka miliki.
2) Masyarakat RW 10 belum teredukasi terkait budidaya maggot
   Hal ini menyebabkan partisipasi dan minat masyarakat khususnya PPKS kurang dalam praktik budidaya maggot di RW 10

3) Dampak Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah sebagai berikut:

1) Manfaat daripada kegiatan budidaya maggot dirasakan hanya oleh satu kelompok yaitu kelompok pemulung.
   Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan tidak luas dan kurang merata sehingga target sasaran pun hanya satu kelompok saja.
2) Belum ada pemberdayaan kepada warga dengan kriteria PPKS melalui kegiatan budidaya maggot
   Hal ini dikarenakan, banyak yang beranggapan bahwa kriteria PPKS memiliki keterampilan yang kurang memadai dalam proses budidaya maggot sehingga keterlibatan mereka kurang diperhatikan.

4) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dilakukan, maka praktikan mengambil fokus masalah yaitu kegiatan budidaya maggot belum melibatkan warga dengan kriteria PPKS. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil identifikasi masalah dan peninjauan langsung ke lapangan.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

1) Meningkatkan cakupan pemberdayaan kegiatan budidaya maggot secara luas dengan melibatkan warga dengan kriteriia PPKS di wilayah RW 10
2) Meningkatkan kemampuan warga dengan kriteria PPKS melalui pelatihan budidaya maggot
3) Menjadikan kegiatan budidaya maggot sebagai sumber penghasilan bagi warga dengan kriteria PPKS

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut potensi dan sumber yang terdapat di Desa Soreang:

1) Fasilitas Bank Sampah

   Dalam hal ini masyarakat dapat mengelola sampah dari bank sampah yang ada di RW 10 melalui fasilitas bank sampah yang disediakan.

2) Mentor Budidaya Maggot,

   Dalam hal ini mentor tersebut dapat memberikan pelatihan budidaya kepada warga secara menyeluruh khususnya warga dengan krtieria PPKS.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di lapangan bahwasanya di RW 10 Desa Soreang terdapat suatu kegiatan pengelolaan sampah organik yang dilakukan oleh pemulung. Dalam kehidupannya, pemulung tersebut mengumpulkan dan memilahkan sampah organik di tempat bank sampah yang ada di RW 10 yang kemudian nantinya hasil daripada pemilahan sampah organik tersebut akan diurai untuk jadi pakan maggot. Maggot sendiri merupakan larva yang mempunyai kemampuan untuk mengurai limbah organik. Maggot akan tumbuh dan berkembang melalui sampah organik tersebut. Pemanfaatan sampah organik melalui budidaya maggot diketahui terdapat banyak sekali manfaat yang diperoleh, seperti misalnya hasil dari maggot ini dapat perjual belikan sebagai pakan hewan ternak.

Untuk kegiatan budidaya maggot ini, sebelumnya memang telah berjalan di RW 10 dan terdapat mentor yang mendampingi dan melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya manfaat dari hasil kegiatan budidaya maggot ini telah menghasilkan nilai ekonomis bagi pemulung tersebut. Namun dengan demikian, melihat kondisi sosial objektif di RW 10, cakupan pemberdayaan melalui budidaya maggot ini masih belum terlalu luas. Artinya kegiatan yang dilakukan belum melibatkan warga yang memang perlu diberdayakan, atau dengan kata lain warga yang masuk dengan kriteria PPKS (Para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Maka dari itu untuk menciptakan cakupan kegiatan pemberdayaan dengan skala yang luas. Praktikan berinisiatif untuk membuat rencana intervensi melalui pemberian pelatihan budidaya maggot kepada warga kususnya kepada warga dengan kriteria PPKS yang ada di RW 10. Menjadikan kegiatan budidaya maggot sebagai sumber penghasilan yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan

b. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun tujuan umum pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjadikan cakupan kegiatan budidaya maggot dengan skala yang luas dan dapat dirasakan juga oleh warga yang memang perlu diberdayakan, selain itu tujuan umum dari program ini adalah menjadikan kegiatan budidaya maggot sebagai sumber penghasilan yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini yaitu:

1) Meningkatkan kapasitas pengetahuan kepada warga dengan kriteria PPKS terkait dengan cara pengelolaan sampah agar menjadi nilai ekonomis
2) Meningkatkan kapasitas kemampuan warga dengan kriteria PPKS dalam hal budidaya maggot
3) Menjadikan kegiatan budidaya maggot yang sustainable

c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan nantinya dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan kepada warga dengan kriteria PPKS yang ada di wilayah RW 10 melalui sosialiasi dan pelatihan budidaya maggot.

Nama program yang akan dilaksanakan yaitu "Pelatihan Budidaya Maggot" yang ditujukan kepada warga dengan kriteria PPKS yang ada di RW 10.

d. Sistem Partisipan

Berikut sistem partisipan yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana intervensi:

Tabel 2. 12 Sistem Partisipan Analis Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	1) Pekerja sosial 2) Mentor budidaya maggot Desa Soreang
3.	Client System	Warga dengan kriteria PPKS
4.	Support System	1) Kepala Desa Soreang 2) Mentor budidaya maggot Desa Soreang
5.	Controling System	Pekerja Sosial
6.	Implementing System	1) Pekerja sosial 2) Mentor budidaya maggot Desa Soreang
7.	Target System	Warga dengan kriteria ppks yang ada di wilayah RW 10

8.	Action System	1) Pekerja Sosial 2) Mentor budidaya maggot Desa Soreang

e. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Pelatihan Budidaya Maggot", metode yang akan digunakan adalah *Community Organization* dan *Community Development* (COCD) yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, proyek, atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk teknik yang akan digunakan adalah penyuluhan dan *capacity building*.

1) Penyuluhan

   Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

2. Pelatihan *Capacity building*

   Pelatihan pengembangan kapsitas merupakakan proses peningkatan kemampuan serta pengetahuan kepada individu, ataupun kelompok. Dalam hal ini pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan budidaya maggot kepada warga dengan kriteria ppks yang ada di wilayah RW 10 Desa Soreang.

f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan

Berikut rancangan anggara biaya dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan program :

Tabel 2. 13 Rancangan Anggaran Biaya Analis Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				

	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	Mentor budidaya maggot Desa Soreang	2	Orang/Jam	5.00.000,00	1.000.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	50	Box	10.000,00	500.000,00
	Snack panitia	10	Box	10.000,00	100.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				620.000,00
	Jumlah Keseluruhan				2.195.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Alat yang dibutuhkan Analis Pemberdayaan Sosial

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
ATK	1	Paket
Sound system	1	Set
Banner kegiatan	1	Buah
Kursi	50	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program yang akan dilaksanakan dengan menggunakan analisis swot :

Tabel 2. 15 Analisis SWOT Analis Pemberdayaan Sosial

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Strenght** : 1. Bekerja sama dengan mentor budidaya maggot 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Partisipan terbuka terhadap perubahan	**Weakness :** 1. Dalam diberikan pelatihan, partisipan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga kemampuan dalam menangkap materi berbeda pula.
Oppurtunities : 1. Meningkatnya kapasistas pengetahuan warga dengan kriteria ppks dalam hal budidaya maggot 2. Kegiatan budidaya maggot dapat menjadi sumber penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan 3. Menjadikan kegiatan budidaya maggot sebagai proses pemberdayaan kepada warga dengan kriteria PPKS	**Strategi SO :** 1. Melakukan pendampingan dalam proses kegiatan budidaya maggot secara berkelanjutan 2. Melakukan riset mendalam tentang pengembangan rencana program	**Strategi WO :** 1. Pengulasan kembali materi peningkatan kapasitas melalui *post test* atau sarana semacamnya
Threat : 1. Tidak terlaksananya kegiatan yang efektif 2. Terjadinya kendala di luar rencana dalam kegiatan yang dilaksanakan	**Strategi ST :** 1. Membuat jadwal rancangan kegiatan 2. Membuat solusi alternatif dalam menangani suatu kendala	**Strategi WT :** 1. Melakukan Monitoring selama kegiatan dan Evaluasi dari setiap hasil kegiatan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Pelatihan Budidaya Maggot dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam pelaksanaan program membuat program ini memperoleh respon positif dari masyarakat serta partisipan yang terbuka terhadap perubahan.

Kemudian kegiatan ini juga mampu meningkatkan kapasitas target sasaran seperti PPKS dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat khususnya PPKS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu yaitu perbedaan pendidikan target sasaran sehingga kemampuan dalam menagkap materi pun berbeda juga. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Pelatihan Budidaya Maggot layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

1) Langkah-Langkah Kegiatan

Berikut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan:

a. Pra pelaksana
   a) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
   b) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
   c) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
   d) Praktikan mengundang Kepala desa, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Mentor budidaya maggot
b. Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh kepala Desa Soreang
   b) Pembacaan Doa oleh Praktikan
   c) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial Masyarakat sekaligus menyampailan maksud dan tujuan kegiatan
   d) Pemberian materi terkait cara pengelolaan sampah agar menjadi nilai ekonomis
   e) Pemberian materi terkait mekanisme budidaya maggot
   f) Pelatihan budidaya maggot
   g) Pembentukan tim tambahan sebagai penanggung jawab
   h) Penutup
c. Pasca Pelaksanaan
   a) Pendampingan
   b) Monitoring dan Evaluasi
   c) Dokumentasi Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan
Berikut jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 2. 16 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Kepala Desa	Sie. Humas	Sambutan Oleh Kepala Desa Soreang
3.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
4.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Pemanfaatan sampah agar menjadi nilai ekonomis Pemateri : Mentor Budidaya Maggot Desa Soreang
6.	10.00 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Mekanisme Budidaya Maggot Pemateri : Mentor Budidaya Maggot Desa Soreang

7.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
8.	13.00 - 14.00	Pelatihan Budidaya Maggot	Sie. Acara	Pelatihan budidaya maggot secara langsung Pemandu : Mentor Budidaya Maggot Desa Soreang
9.	14.00 - 15.00	Pembentukan Tim Penanggung Jawab	Sie. Acara	Pembentukan Tim Penanggung Jawab dalam pengelolaan budidaya maggot Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
10.	15.00 - 15.15	Penutup	Sie. Acara	-

D. Profil Analisis Penata Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia banyak sekali terjadi di daerah-daerah perkotaan maupun pedesaaan, kerusakan lingkungan yang terjadi antara lain seperti peningkatan suhu dan polusi udara, kurang tersedianya ruang terbuka hijau, membuang sampah sembarang, budaya merokok dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya bisa diminimalisir dengan adanya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan alam.

Salah satu penanaman cara dalam mengembangkan nilai karakter peduli lingkungan yaitu dengan adanya Program *Green School*. Program tersebut dapat dikatakan sebagai program yang dilaksanakan untuk menanamkan sikap peduli lingkungan siswa dalam melaksanakan dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata yaitu input, proses, dan output penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada wawasan lingkungan. Berdasarkan landasan tersebut *green school* merupakan

salah satu program dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan siswa 4 dalam pelestarian lingkungan.

Melihat kondisi sosial objektif di lapangan, bahwasanya terdapat salah satu sekolah di Desa Soreang yan telah menerapkan Program *Green School* (Sekolah Hijau). Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di lapangan bahwasanya sekolah SD Cibiru telah menerapkan program tersebut. Awalnya program ini dibentuk karna inisiatif dari salah satu seorang guru dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri dan meningkatkan kenyamanan dalam belajar-mengajar. Bentuk kegiatan yang dilakukan dari Program *Green School* di SD Cibiru ini meliputi kegiatan memilah sampah, penghijauan, dan menjaga kerapihan lingkungan sekolah. Kegiatan Program *Green School* di SD Cibiru telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Pencapaian kegiatan Program *Green School* di SD Cibiru telah meraih banyak prestasi dan dipercontohkan kepada sekolah-sekolah lain, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan berdampak juga kepada lingkungan yang ada di luar sekolah.

Namun dengan demikian, setelah praktikan melakukan asesmen lebih lanjut terkait program ini, didapatkan hasil bahwa perkembangan dari program ini dinilai menurun secara drastis. Kegiatan yang telah berjalan sudah tidak lagi aktif seperti kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, guru yang sebelumnya menjadi inisiator dari pembentukan program ini sudah tidak lagi dapat mengelola program secara keseluruhan, karena disatu sisi guru tersebut telah diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SD Cibiru. Dengan adanya kenaikan jabatan ataupun golongan, prioritas ataupun kesibukan yang dimiliki nya juga sudah berbeda. Artinya adanya keterbatasan waktu yang beliau miliki sehingga tidak lagi dapat mengelola Program *Green School* di SD Cibiru secara keseluruhan.

2. Tinjauan Konsep

a. Penataan Lingkungan

Penataan lingkungan merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan fungsinya. Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang/lingkungan memiliki tujuan:

1) terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan,
2) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya,

3) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Penataan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan berdaya guna.

Penataan lingkungan hidup yang baik akan terpelihara kualitas lingkungan. Berdasarkan fungsi utama kawasan, penataan lingkungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu:

1) kawasan lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contoh: hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan cagar alam, dan sebagainya.

2) kawasan budi daya, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Contoh: lahan budi daya jagung, kayu, sawah, dan lain-lain.

Berdasarkan kegiatan utamanya, penataan lingkungan hidup terdiri dari 3 kawasan, yaitu:

1) Kawasan perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam.

2) Kawasan perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

3) Kawasan tertentu, adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan

b. Program Sekolah Hijau

Secara bahasa, *green school* berarti sekolah hijau. Namun, yang dimaksud hijau di sini bukan hanya tampilan fisik sekolah saja yang hijau atau rindang, melainkan juga eksistensi sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. *Green school* dapat didefinisikan sebagai sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program program tertentu untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktivitas sekolah. Tampilan fisik sekolah ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh warga sekolah agar mampu bersikap arif dan berprilaku ramah lingkungan.

Green school atau disebut dengan adiwiyata merupakan salah satu program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Adiwiyata mempunyai pengertian sebagai tempat yang baik dan ideal tempat

memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Dalam program ini diharapkan semua warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Green school dalam konsep adiwiyata melalui modul terbaru 2012 adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya alam sebagai solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh warga seputar sekolah. Adapun komponenkomponen lain menjadi pelengkap yang disesuaikan oleh kondisi lingkungan sekolah. *Green school* memiliki sasaran untuk seluruh warga sekolah. Dengan maksud untuk membangun serta menggali partisipasi warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki muatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan

c. Tujuan Program Sekolah Hijau

Tujuan diadakannya sekolah hijau adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran siswa dalam memelihara lingkungan sekolah
2) Memupuk sikap positif dan cinta lingkungan di kalangan warga sekolah
3) Membentuk lingkungan sekolah yang menitikberatkan pemeliharaan sumber daya alam
4) Berusaha untuk membuat sekolah melaksanakan pendidikan lingkungan yang berkelanjutan

d. Bentuk Kegiatan Program Sekolah Hijau

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Hijau:

1) *Rethink, Reduce, Repair, Reause, Recycle*
2) Penghematan air dan energi listrik
3) Penghijauan sekolah

e. Manfaat Program Sekolah Hijau

Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan program sekolah hijau antara lain sebagai berikut:

1) Pelestarian alam
2) Menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah
3) Meningkatkan nilai estetika di sekolah

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Melihat kondisi sosial objektif di lapangan, bahwasanya terdapat salah satu sekolah di Desa Soreang yan telah menerapkan Program *Green School* (Sekolah Hijau). Berdasarkan hasil penelitian yang praktikan temukan di lapangan bahwasanya sekolah SD Cibiru telah menerapkan program tersebut. Awalnya program ini dibentuk karna inisiatif dari salah satu seorang guru dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, asri dan meningkatkan kenyamanan dalam belajar-mengajar. Bentuk kegiatan yang dilakukan dari Program Green School di SD Cibiru ini meliputi kegiatan memilah sampah, penghijauan, dan menjaga kerapihan lingkungan sekolah. Kegiatan Program *Green School* di SD Cibiru telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi. Pencapaian kegiatan Program *Green School* di SD Cibiru telah meraih banyak prestasi dan dipercontohkan kepada sekolah-sekolah lain, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan berdampak juga kepada lingkungan yang ada di luar sekolah.

Namun dengan demikian, setelah praktikan melakukan asesmen lebih lanjut terkait program ini, didapatkan hasil bahwa perkembangan dari program ini dinilai menurun secara drastis. Kegiatan yang telah berjalan sudah tidak lagi aktif seperti kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, guru yang sebelumnya menjadi inisiator dari pembentukan program ini sudah tidak lagi dapat mengelola program secara keseluruhan, karena disatu sisi guru tersebut telah diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SD Cibiru. Dengan adanya kenaikan jabatan ataupun golongan, prioritas ataupun kesibukan yang dimiliki nya juga sudah berbeda. Artinya adanya keterbatasan waktu yang beliau miliki sehingga tidak lagi dapat mengelola Program *Green School* di SD Cibiru secara keseluruhan.

1) Analisis Pohon Masalah

Dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan, praktikan menggunakan teknik analisis sebab akibat melalui Teknik Analisis Pohon masalah, dengan rincian sebagai berikut:

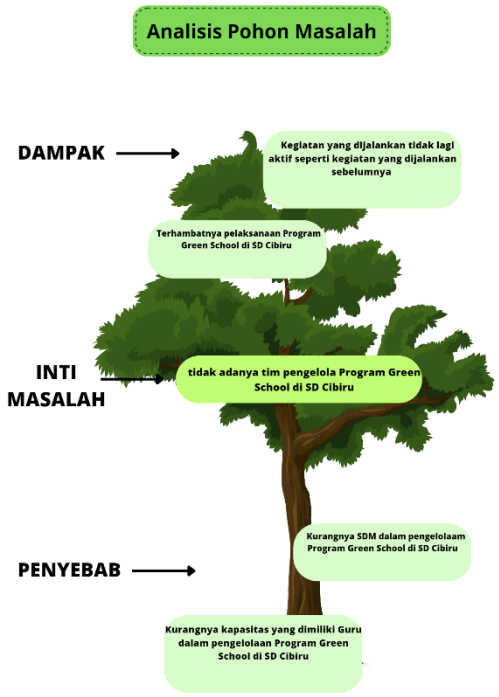

2) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah, adapun penyebab permasalahan yang terjadi yaitu:

1) Kurangnya kapasitas yang dimiliki Guru dalam pengelolaan Program *Green School* di SD Cibiru

   Hal ini dikarenakan kemampuan akan keterampilan dalam pengelolaan Program *Green School* ini kurang memadai sehingga menghambat pelaksanaan program.

2) Kurangnya SDM dalam pengelolaam Program *Green School* di SD Cibiru

   Hal ini dikarenakan tidak semua warga sekolah mampu dan mau terlibat dan berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan.

3) Dampak Masalah

Gambar 9 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil analisis pohon masalah, adapun dampak permasalahan yang terjadi yaitu:

1) Terhambatnya pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru

   Hal ini dikarenakan terbatasnya kapasitas yang dimiliki oleh potensi sumber di SD Cibiru.

2) Kegiatan yang dijalankan tidak lagi aktif seperti kegiatan yang dijalankan sebelumnya

Hal ini diakibatkan karena SDM yang tidak mumpuni dalam pengelolaannya sehingga perlu adanya penataan ulang terhadap Program *Green School* di SD Cibiru.

4) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi fokus masalah untuk dianalisis lebih lanjut adalah tidak adanya tim pengelola Program *Green School* di SD Cibiru.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan identifikasi masalah, maka berikut ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh target sasaran:

1) Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan Program *Green School*.
2) Kebutuhan akan tim pengelola dalam pelaksanaan Program *Green School*.
3) Mengaktifkan kembali Program *Green School* yang sebelumnya terhambat karena keterbatasan.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut ini potensi dan sumber yang terdapat di Desa Soreang:

1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dapat memberikan pengetahuan serta pelatihan kemampuan kepada guru dalam pengelolaan Program *Green School* di SD Cibiru.

2) Guru SD Cibiru

Dalam hal ini seluruh Guru SD Cibiru dapat dilibatkan ke dalam tim penanggung jawab terhadap pelaksanaan Program *Green School* .

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Perkembangan dari Program *Green School* di SD Cibiru dinilai menurun secara drastis. Kegiatan yang telah berjalan sudah tidak lagi aktif seperti kegiatan yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini dikarenakan, guru yang sebelumnya menjadi inisiator dari pembentukan program ini sudah tidak lagi dapat mengelola program secara keseluruhan, karena disatu sisi guru tersebut telah diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SD Cibiru. Dengan adanya kenaikan jabatan ataupun golongan, prioritas ataupun kesibukan yang dimiliki

nya juga sudah berbeda. Artinya adanya keterbatasan waktu yang beliau miliki sehingga tidak lagi dapat mengelola Program *Green School* di SD Cibiru secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebleumnya, maka dibutuhkan suatu rencana intervensi yang dapat memulihkan kondisi tersebut. Berdasarkan hal ini, praktikan berinisiatif untuk membuat rencana intervensi yang kemudian nantinya dapat membantu Guru SD Cibiru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk menghidupkan atau mengupayakan kembali kegiatan-kegiatan pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru yang telah berjalan sebelumnya. Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan program yaitu:

1) Meningkatkan kapasitas pengetahuan Guru SD Cibiru tentang pentingnya pelaksanaan Program *Green School*
2) Membentuk tim penanggung jawab pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru
3) Meningkatkan pengetahuan tentang tupoksi dari tim penanggung jawab terhadap keberlanjutan pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru

c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan nantinya dengan memberikan penyuluhan kepada Guru SD Cibiru tentang pentingnya pelaksanaan Program *Green School*, dan pembentukan tim penanggung jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program *Green School* yang telah berjalan sebelumnya.

Nama program yang akan dilaksanakan yaitu "Optimalisasi Pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru melalui Pembentukan Tim Penanggung Jawab"

d. Sistem Partisipan

Berikut merupakan sistem partisipan yang diperlukan dalam pelaksanaan program:

Tabel 2. 17 Sistem Partisipan Analis Penataan Lingkungan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 2) Pekerja sosial
3.	Client System	Guru SD Cibiru

4.	Support System	1) Kepala Sekolah SD Cibiru 2) Kepala Desa Soreang 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
5.	Controling System	1) Pekerja Sosial 2) Kepala Sekolah SD Cibiru
6.	Implementing System	1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 2) Pekerja sosial
7.	Target System	Seluruh Guru SD Cibiru
8.	Action System	1) Pekerja Sosial 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

e. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Optimalisasi Pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru melalui Pembentukan Tim Penanggung Jawab ", metode yang akan digunakan adalah *Community Organization* dan *Community Development* (COCD) yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, proyek, atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk teknik yang akan digunakan adalah penyuluhan dan *capacity building*.

1. Penyuluhan

   Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

2. *Capacity Building*

   Pelatihan pengembangan kapsitas merupakakan proses peningkatan kemampuan serta pengetahuan kepada individu, ataupun kelompok. Dalam hal ini pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan budidaya maggot kepada warga dengan kriteria ppks yang ada di wilayah RW 10 Desa Soreang

f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan

Berikut rancangan anggaran yang diperlukan untuk realisasi program:

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	2	Orang/Jam	9.00.000,00	1.800.000,00
	Jumlah II				1.800.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	20	Box	20.000,00	400.000,00
	Snack panitia	5	Box	20.000,00	100.000,00
	Snack narasumber	2	Box	20.000,00	40.000,00
	Jumlah III				540.000,00
	Jumlah Keseluruhan				2.915.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Alat yang dibutuhkan Analis Penataan Lingkungan Sosial

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor + Proyektor	1	Buah
ATK	1	Paket

Sound system	1	Set
Banner kegiatan	1	Buah
Kursi	20	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut ini analisis SWOT yang digunakan dalam pelaksanaan rencana intervensi:

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Strenght** : 1. Tersedianya Sumber daya pelaksana 2. Kegiatan di dukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, dan Kepala Sekolah SD Cibiru 3. Guru SD Cibiru berpartisipasi aktif dalam kegiatan	**Weakness :** 1. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Guru SD Cibiru 2. Tidak semua guru berpartisipasi ke dalam kegiatan
Oppurtunities : 1. Terbentuknya Tim pengelola Program *Green School* di SD Cibiru 2. Program *Green School* di SD Cibiru dapat kembali aktif 3. Program *Green School* SD Cibiru dapat bermanfaaat bagi lingkungan sekitar	**Strategi SO :** 1. Melakukan kerja sama dengan DLH Kabupaten Bandung dan Kepala Sekolah SD Cibiru *2.* Melibatkan seluruh Guru SD Cibiru dalam pembentukan tim pengelola Program *Green School* 3. Membuat konsep dan penataan ulang terhadap pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru	**Strategi WO :** 1. Membuat timeline kegiatan 2. Menyebarluaskan informasi kegiatan dari jauh-jauh hari
Threat :	**Strategi ST :**	**Strategi WT :**

1. Tim pengelola program yang telah dibentuk tidak berjalan aktif dan efektif	1. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan	1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dari setiap hasil kegiatan

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Optimalisasi Pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru melalui Pembentukan Tim Penanggung Jawab dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa adanya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung serta sumber daya pelaksana program membuat program ini mudah untuk direalisasikan.

Kemudian kegiatan ini juga mampu mengaktifkan kembali program yang sebelumnya terhambat karena adanya pembentukan tim penanggung jawab dan pelaksana program kedepannya.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya dua yaitu tidak semua guru berpartisipasi dalam kegiatan serta adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Optimalisasi Pelaksanaan Program *Green School* di SD Cibiru melalui Pembentukan Tim Penanggung Jawab layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

1) Langkah-Langkah Kegiatan

Berikut langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan:

a. Pra pelaksana
   a) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
   b) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
   c) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
   d) Praktikan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Pekerja Sosial Masyarakat dan Kepala Desa Soreang
b. Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh kepala Desa Soreang
   b) Sambutan oleh Kepala Sekolah SD Cibiru
   c) Pembacaan Doa oleh Praktikan
   d) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial sekaligus menyampailan maksud dan tujuan kegiatan
   e) Penyampaian materi terkait Konsep Program *Green School* oleh Dinas Lingkungan Hidup

f) Pemberian materi terkait manfaat dan pentingnya pelaksanaan Program *Green School*
g) Pembentukan Tim pengelola Program *Green School* di SD Cibiru
h) Penyampaian materi tentang pengembangan Program *Green School* di SD Cibiru
i) Penutup

c. Pasca Pelaksanaan
a) Pendampingan
b) Monitoring dan Evaluasi
c) Dokumentasi Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut jadwal kegiatan program yang akan dilaksanakan:

Tabel 2. 19 Jadwal Kegiatan Analis Penataan Lingkungan Sosial

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Kepala Desa	Sie. Humas	Sambutan Oleh Kepala Desa Soreang
2.	08.15 - 08.30	Sambutan Kepala Sekolah	Sie. Humas	Sambutan oleh Kepala Sekolah SD Cibiru
3.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
4.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 –10.30	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Konsep Program *Green School* Pemateri :

				DLH Kabupaten Bandung
6.	10.30 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Manfaat dan Pentingnya Pelaksanaan Program *Green School* Pemateri : DLH Kabupaten Bandung
7.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
8.	13.00 - 14.00	Pembentukan Tim Pengelola	Sie. Acara	Pembentukan Tim Pengelola Program *Green School* dengan melibatkan Guru SD Cibiru Pemandu : Pekerja Sosial
9.	14.00 - 15.00	Penyampaian Materi 3	Sie. Acara	Materi : Pengembangan Program *Green School* di SD Cibiru Pemateri : Pekerja Sosial
10.	15.00 - 15.15	Penutup	Sie. Acara	-

E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari berbagai kajian literatur yang praktikan temukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan karena tiga hal.

Pertama adanya kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Desa Soreang, Kecamatan Soreang merupakan daerah yang belum terlepas dari permasalahn banjir. Berdasarkan hasil asesmen yang praktikan lakukan bersama dengan ketua RW 23 Desa Soreang, bahwasanya di wilayah tersebut memiliki beberapa titik rawan terjadinya bencana banjir. Banjir yang terjadi di RW 23, Desa Soreang disebabkan oleh 2 faktor. Pertama faktor alami, yaitu adanya curah hujan yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus, dan kedua faktor non alami, yaitu faktor yang disebabkan karna ativitas manusia, hal ini dapat dilihat dari adanya aktivitas pembangunan dari tahun ke tahun, seperti misalnya pembangunan yang memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Maka dari itu, akibat dari pesatnya pembangunan ini maka semakin banyak lahan yang tertutup dengan jalan dan bangunan lainnya. Dengan demikian ketika terjadinya curah hujan yang tinggi, wilayah RW 23 Desa Soreang berpotensi terhadap terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi lahan yang dapat menampung air ke dalam tanah. Kesadaran warga RW 23 terhadap penanggulangan bencana masih rendah, kejadian bencana yang berulang-ulang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Di Indonesia sebuah bencana lebih dianggap sebagai takdir Tuhan, sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi bencana. Pada kenyataanya, bencana bisa dicegah dan kemunculannya bisa dideteksi melalui tanda-tanda.

2. Tinjauan Konsep

a. Pengertian Bencana

Berdasarkan UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan

sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik (Arie Priambodo, 2009: 22)

b. Manajemen Penanggulangan Bencana

Tyas (2016) dalam Rofifah (2019) menyebutkan bahwa manajemen penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana sesuai pada siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi tiga diantaranya fase pra bencana disebut sebagai fase kesiapsiagaan yang terdiri atas pencegahan dan mitigasi *(prevention and mitigation)*, fase bencana disebut sebagai fase tanggap darurat (response) yang terdiri atas fase akut *(acute phase)* serta fase sub akut *(sub acute phase)* dan yang terakhir adalah fase pasca bencana atau biasa disebut sebagai fase rekonstruksi yang terdiri dari fase pemulihan atau perbaikan (recovery phase) dan fase rehabilitasi atau rekonstruksi *(rehabilitation or reconstruction phase).*

Kesiapsiagaan *(preparedness)* adalah aktivitas serta yang diambil sebelum bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak dari bencana, contohnya berupa memberikan peringatan dini yang tepat dan efektif serta dengan mengevakuasi penduduk dan harta benda dari lokasi yang terancam. Beberapa kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

1) Peringatan dini Sebagai pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
2) Mitigasi *(mitigation)* Langkah struktural dan non struktural yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.
3) Tahap tanggap darurat merupakan tindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat atau komunitas yang mengalami bencana, guna mengantisipasi bertambahnya korban jiwa. dari sudut pandang pelayanan medis, bencana terbagi menjadi “fase akut” dan “fase sub akut”. Pada fase akut, 48 jam pertama sejak kejadian bencana dinamakan “fase penyelamatan dan pertolongan/pelayanan medis darurat” kegiatan yang dilakukan adalah penyelamatan dan pertolongan baik berupa tindakan medis darurat terhadap korban luka. Satu minggu setelah terjadinya bencana disebut dengan “fase sub akut” kegiatan yang dilakukan adalah perawatan terhadap orang-orang yang terluka pada saat mengungsi atau dievakuasi, serta dilakukan intervensi terhadap

munculnya permasalahan kesehatan selama dalam pengungsian.

4) Tahap pemulihan berupa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi normal. Tahap rekonstruksi merupakan tahap yang bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana

c. Bencana Banjir

Banjir di defenisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilaah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi" (IDEP,2007). "Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung

d. Jenis-jenis Banjir

Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI (2018), banjir dibedakan menjadi lima tipe sebagai berikut:

1) Banjir Bandang
   Banjir yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan cukup parah. Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan.
2) Banjir Air
   Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi, biasanya banjir in terjadi akibat meluapnya air sungai, danau atau selokan. Karena intensitas banyak sehingga air tidak tertamoung dan meluap itulah banjir air.
3) Banjir Lumpur
   Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang tapi banjir lumpur yaitu banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan.banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang mempengaruhi kesehatan makhul hidup lainnya.
4) Banjir Rob (Banjir laut air pasang)
   Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai

e. Faktor-faktor Penyebab Banjir

Berikut faktor-fakto penyebab banjir berdasarkan jenisnya :

1) Penyebab Banjir secara alami
   a. Curah Hujan
   b. Pengaruh Fisiografi
   c. Erosi dan Sedimentasi
   d. Kapasitas Sungai
   e. Kapasitas drainase yang tidak memadai
   f. Pengaruh air pasang
2) Penyebab banjir akibat aktivitas manusia
   a. Perubahan kondisi DAS
   b. Kawasan kumuh dan sampah
   c. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian
   d. Kerusakan bangunan pengendali air
   e. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat
   f. Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alami)

3. Asemen

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil asesmen yang praktikan lakukan bersama dengan ketua RW 23 Desa Soreang bahwasanya wilayah ini memang merupakan bagian dari titik rawan terjadinya bencana banjir di Desa Soreang. Bencana banjir yang terjadi di RW 23 Desa Soreang, dikarenakan wilayah tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Perkembangan yang terjadi di wilayah RW 23 terjadi begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya pertambahan penduduk dan adanya aktivitas pembangunan dari tahun ke tahun, seperti misalnya pembangunan yang memanfaatkan lahan kososng untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Secara kondisi geografis, tata letak antar rumah warga dengan rumah warga lainnya saling berdekatan, dan memiliki akses jalan yang sempit.

Maka dari itu, akibat dari pesatnya pembangunan ini maka semakin banyak lahan yang tertutup dengan jalan dan bangunan lainnya. Dengan demikian ketika terjadinya curah hujan yang tinggi, wilayah RW 23 Desa Soreang akan berpotensi terhadap terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi lahan yang mampu menampung ataupun meresap ke dalam tanah. Kesadaran warga RW 23 terhadap penanggulangan bencana masih rendah, kejadian bencana yang berulang-ulang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Di Indonesia sebuah bencana lebih dianggap sebagai takdir Tuhan, sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi bencana. Pada kenyataanya, bencana bisa dicegah dan kemunculannya bisa dideteksi melalui tanda-tanda.

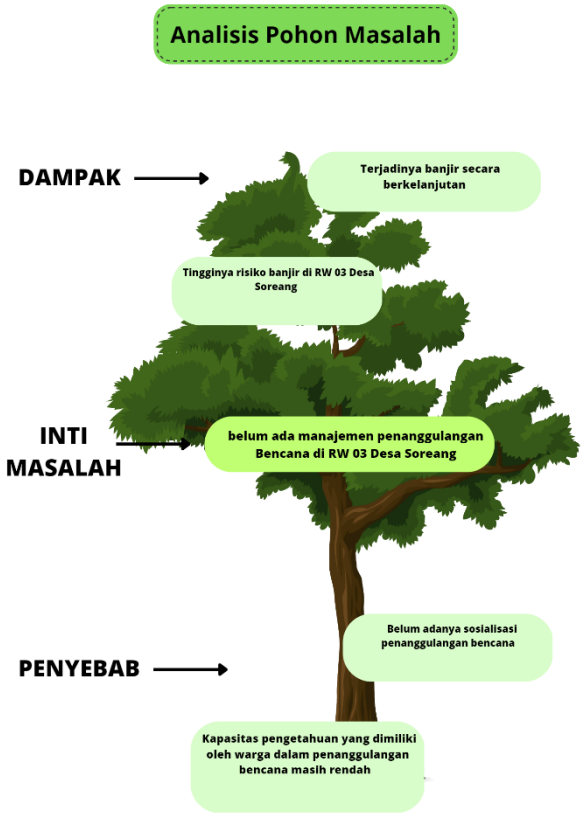

1) Analisis Pohon Masalah

Berikut analisis masalah yang praktikan lakukan dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah:

2) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka penyebab masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Belum adanya so[Tingginya risiko banjir di RW 23 Desa Soreang] penanggulangan bencana

   Hal ini dikarenakan pihak pemerintah Desa Soreang belum memiliki program terkait sosialisasi penanggulangan bencana banjir di Desa Soreang.

2) Kapasitas penge[Belum ada manajemen penanggulangan bencana di RW 23 Desa Soreang]ki oleh warga dalam penanggulangan bencana masih rendah

   Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dan kurangnya inisiatif warga untuk mencari tau lebih lanjut terkait manajemen penanggulangan bencana.

Gambar 10 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana

3) Dampak Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah maka dampak masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Tingginya risiko banjir di RW 23 Desa Soreang

Hal ini dikarenakan tidak adanya program penanggulangan banjir sehingga *self awareness* masyarakat juga kurang terhadap penanggulangan bencana banjir.

2) Terjadinya banjir secara berkelanjutan

Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian permasalahan banjir dari pemerintah setempat sehingga banjir yang terjadi berkelanjutan.

4) Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi fokus masalah untuk dianalisis lebih lanjut adalah belum ada manajemen penanggulangan bencana.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berikut apa yang menjadi kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada:

1) Kebutuhan akan kesadaran kepada masyarakat terhadap terjadinya bencana banjir.
2) Kebutuhan akan pengetahuan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat Desa Soreang.
3) Kebutuhan akan lahan yang dapat menampung air hujan seperti sumur resapan air atau biopori.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut Potensi dan Sumber yang dapat dimanfaatkan :

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam hal ini BPBD dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Soreang terkait dengan bencana banjir dan solusi dari bencana tersebut .

2) Taruna Siaga Bencana

Dalam hal ini TAGANA dapat memberikan pelatihan bencana banjir kepada masyarakat Desa Soreang.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Berdasarkan hasil asesmen yang praktikan lakukan bersama dengan ketua RW 23 Desa Soreang, bahwasanya di wilayah tersebut memiliki beberapa titik

rawan terjadinya bencana banjir. Banjir yang terjadi di RW 23, Desa Soreang disebabkan oleh 2 faktor. Pertama faktor alami, yaitu adanya curah hujan yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus, dan kedua faktor non alami, yaitu faktor yang disebabkan karna ativitas manusia, hal ini dapat dilihat dari adanya aktivitas pembangunan dari tahun ke tahun, seperti misalnya pembangunan yang memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Maka dari itu, akibat dari pesatnya pembangunan ini maka semakin banyak lahan yang tertutup dengan jalan dan bangunan lainnya. Dengan demikian ketika terjadinya curah hujan yang tinggi, wilayah RW 23 Desa Soreang akan berpotensi terhadap terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi lahan yang mampu menampung ataupun meresap ke dalam tanah. Kesadaran warga RW 23 terhadap terjadinya bencana masih rendah, kejadian bencana yang berulang-ulang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Di Indonesia sebuah bencana lebih dianggap sebagai takdir Tuhan, sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi bencana. Pada kenyataanya, bencana bisa dicegah dan kemunculannya bisa dideteksi melalui tanda-tanda.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebleumnya, maka dibutuhkan suatu rencana intervensi yang dapat memulihkan kondisi tersebut. Berdasarkan hal ini, praktikan berinisiatif untuk membuat rencana intervensi yang kemudian nantinya dapat membantu Warga RW 23 Desa Soreang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum dibentuknya program ini adalah untuk meminimalisir terjadinya banjir di RW 23 dengan pembuatan lubang biopori sebagai solusi alternatif. Adapun tujuan khusus pembuatan program adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan
2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan warga dalam penanggulangan bencana
3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan

c. Bentuk Kegiatan dan Nama Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan nantinya adalah memberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana banjir melalui penyuluhan sosial kepada masyarakat dan memberikan pelatihan pembuatan biopori dalam meminimalisir terjadinya banjir di RW 23.

Adapun program yang akan dilaksanakan yaitu “Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air”.

d. Sistem Partisipan

Berikut ini sistem partisipan yang diperlukan dalam pelaksanaan program:

Tabel 2. 20 Sistem Partisipan Analis Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	1) Pekerja sosial 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
3.	Client System	Warga RW 23 Desa Soreang
4.	Support System	1) BPBD Kabupaten Bandung 2) TAGANA 3) Desa Soreang
5.	Controling System	1) Pekerja Sosial 2) Ketua RW 23 Desa Soreang
6.	Implementing System	1) BPBD Kabupaten Bandung 2) TAGANA 3) Pekerja Sosial
7.	Target System	Warga RW 03 Desa Soreang
8.	Action System	1) Pekerja Sosial 2) BPBD Kabupaten Bandung 3) TAGANA

e. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air ", metode yang akan digunakan adalah *Community Organization* dan *Community Development* (COCD) yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, proyek, atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk teknik yang akan digunakan adalah penyuluhan dan *capacity building*.

1. Penyuluhan

   Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak

lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

2. *Capacity building*

   Pelatihan pengembangan kapsitas merupakakan proses peningkatan kemampuan serta pengetahuan kepada individu, ataupun kelompok. Dalam hal ini pelatihan yang akan diberikan berupa pelatihan pembuatan biopori kepada warga RW 23

f. Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan

Berikut rancangan anggaran biaya yang diperlukan dalam realisasi program:

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	BPBD Kabupaten Bandung	2	Orang/Jam	5.00.000,00	1.000.000,00
	TAGANA	12	Orang/Jam	2.00.000,00	2.400.000,00
	Jumlah II				3.400.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	32	Box	10.000,00	320.000,00
	Snack panitia	10	Box	10.000,00	100.000,00

	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				300.000,00
	Jumlah Keseluruhan				4.415.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Alat yang dibutuhkan Analis Penanggulangan Bencana

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Kursi Narasumber	2	Buah
ATK	1	Paket
Sound system	1	Set
Banner kegiatan	1	Buah
Kursi	32	Buah
Terminal/kabel roll	2	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air:

Tabel 2. 22 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Strenght** : 1. Tersedianya sumber daya pelaksana 2. Kegiatan didukung oleh BPBD dan TAGANA 3. Partsipan aktif dalam kegiatan	**Weakness :** 1. Warga RW 23 sedikit yang memiliki usia produktif
Oppurtunities : 1. Meningkatnya kemampuan warga dalam penanggulangan bencana banjir 2. Meningkatnya kesadaran warga terhadap terjadinya bencana 3. Terselesaikannya masalah banjir di RW 23 Desa Soreang	**Strategi SO :** 1. Melakukan kerjasama dengan BPBD, TAGANA 2. Bekerja sama dengan Karang Taruna dalam pembuatan biopori 3. Membuat prosedur atau langkah-langkah pembuatan biopori	**Strategi WO :** 1. Melibatkan remaja yang mempunyai usia produktif dalam kegiatan pelatihan
Threat : 1. Biopori yang sudah dibentuk tidak mampu meresap air secara keseluruhan 2. Tetap terjadinya banjir	**Strategi ST :** 1. Meningkatkan pendampingan secara berkelanjutan 2. Membuat prosedur dan langkah-langkah mitigasi bencana banjir	**Strategi WT :** 1. Membuat kelompok siaga bencana

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan

dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa adanya dukungan dari BPBD dan TAGANA serta sumber daya pelaksana program membuat program ini mudah untuk direalisasikan.

Kemudian kegiatan ini juga mampumeningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat RW 23 terhadap pentingnya penanggulangan bencana banjir sehingga banjir mampu diminimalisir.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu yaitu di RW 23 hanya memiliki sedikit masyarakat yang berusia produktif. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

1) Langkah-Langkah Kegiatan

Berikut ini langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya:

a. Pra pelaksana
   a) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
   b) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
   c) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
   d) Praktikan mengundang BPBD Kabupaten Bandung, TAGANA, Karang Taruna RW 23, dan Kepala Desa Soreang
b. Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh kepala Desa Soreang
   b) Sambutan oleh Ketua RW 23
   c) Pembacaan Doa oleh Praktikan
   d) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial sekaligus menyampailan maksud dan tujuan kegiatan
   e) Penyampaian materi terkait Penanggulangan Bencana banjir
   f) Penyampaian materi terkait biopori dan reboisasi
   g) Pelatihan pembuatan biopori
   h) Penyampaian Materi terkait pemeliharaan biopori
   i) Penutup
c. Pasca Pelaksanaan
   a) Pendampingan
   b) Monitoring dan Evaluasi
   c) Dokumentasi Kegiatan

2) Jadwal Kegiatan

Berikut ini jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 2. 23 Jadwal Kegiatan Analis Penanggulangan Bencana

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Kepala Desa	Sie. Humas	Sambutan Oleh Kepala Desa Soreang
2.	08.15 - 08.30	Sambutan Ketua RW	Sie. Humas	Sambutan oleh Ketua RW 23 Desa Soreang
3.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
4.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 – 10.30	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Penanggulangan bencana banjir Pemateri : BPBD Kabupaten Bandung
6.	10.30 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Biopori dan Reboisasi Pemateri : BPBD Kabupaten Bandung
7.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
8.	13.00 - 14.00	Pembentukan Biopori	Sie. Acara	Pembentukan Biopori resapan air Pemandu : TAGANA

9.	14.00 - 15.00	Penyampaian Materi 3	Sie. Acara	Materi : Pemliharaan Biopori Pemateri : Pekerja Sosial
10.	15.00 - 15.15	Penutup	Sie. Acara	-

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah terlaksana yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Dari pelaksanaan kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dengan pengumpulan data melalui data sekunder di Desa Soreang. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan ketika mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

1. Analis Jaminan Sosial

   Dalam profil Analis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu masalah masalah mengenai kurangnya informasi bagi pedagang kaki lima terhadap program BPJS Ketenagakerjaan baik dari kegunaannya, iurannya, dan pendaftarannya sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program "PEKA BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima" yaitu Peningkatan Kapasitas melalui Sosialisasi dan Pendampingan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima dengan target sasaran para pedagang kaki lima di Desa Soreang.
2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

   Dalam profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan memilih isu mengenai kurang optimalnya pengelolaan bantuan dari organisasi Said Naum. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui "Sosialisasi Efektivitas dalam Manajemen Program"
3. Analis Pemberdayaan Sosial

   Dalam profil Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan memilih isu kegiatan budidaya maggot belum melibatkan warga dengan kriteria PPKS. Dalam upaya pemecahan masalah tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui "Pelatihan Budidaya Maggot".
4. Analis Penataan Lingkungan Sosial

   Dalam profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih isu mengenai tidak adanya tim pengelola Program *Green School* di SD Cibiru. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program "Optimalisasi Pelaksanaan Program

Green School di SD Cibiru melalui Pembentukan Tim Penanggung Jawab".

5. Analis Penanggulangan Bencana

   Dalam profil Analis Penanggulangan Bencana, praktikan memilih isu mengenai belum adanya penanggulangan bencana banjir di RW 23 Desa Soreang. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program "Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air".

Secara garis besar, manfaat lain yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan praktikum ini yaitu kemampuan menganalisis masalah yang dimiliki mahasiswa meningkat. Mahasiswa juga mendapat pengetahuan-pengetahuan baru terkait profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang belum di dapat di bangku perkuliahan.

B. Saran

1. Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
   a. Diharapkan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar pengalaman dan keterampilan mahasiswa dapat lebih berkembang.
   b. Mengundang narasumber yang ekspert di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mahasiswa mengetahui peluang kerja yang sesuai dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
   c. Memberikan supervisi yang mampu membangun pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam praktiknya di lapangan.
2. Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
   a. Mendukung mahasiswa dalam aktif di lapangan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
   b. Dimohon untuk tidak terlalu mendadak dalam memberikan informasi mengenai praktikum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianingsih, A. d. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal di Kota Pekalongan.

Hadi Sugito, S. (2022, Oktober 24). Solusi Mengatasi Banjir dengan Membuat Sumur Resapan Air (SRA). Diambil kembali dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang: https://cdkmalang.dishut.jatimprov.go.id/solusi-mengatasi-banjir-dengan-membuat-sumur-resapan-air-sra/

HENDARSI, M. M. (2022). Kendala Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Bantengan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. *UAJY'S LIBRARY*.

Muhammad Imran, N. S. (2019). Pendampingan Pembuatan dan Pemasangan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air dan Komposting di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Mustofa, A. (2021, Mei 7). Budayakan Sekolah Hijau Bersih dan Indah. Diambil kembali dari Jawa Pos Radar Kudus: https://radarkudus.jawapos.com/pendidikan/07/05/2021/budayakan-sekolah-hijau-bersih-dan-indah/

Paramita, V. S., Indiyati, D., Ndaruhadi, P. W., & Nuyman, A. (2017). Manajemen Sekolah Hijau Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*.

Rahayu, M. J., Buchori, I., & Widjajanti, R. (2020). Upaya Penataan Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta. *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN*.

Soni Maulana Ahmad, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Maggot BSF dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pakan Ternak. *JOURNAL OF EMPOWERMENT*.

Syafitri Jumianto, K. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Jampang Melalui Biokonversi Sampah dengan Maggot BSF. *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 0157/9.7/KS.01/01/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Kamis, 2 Februari 2023
W a k t u	: Pk. 08.00 – 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial
Narasumber	: Gayatri Waditra Nirwesti,ME
Tempat	: Gedung Pascasarjana lantai 2 Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 31 Januari 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 2 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 0157/9.7/KS.01/02/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu, 22 Februari 2023
W a k t u	: Pk. 10.00 – 12.00 WIB
Materi	: **Peningkatan Kompetensi Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial**
Narasumber	: Tonton Heriyanto (CSR Manager PT.AAPC Indonesia)
Tempat	: Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 17 Februari 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 3 Surat Pengumuman Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu, 8 Maret 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial
Narasumber	: Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur)
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 6 Maret 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 4 Surat Pembekalan Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Jumat, 24 Maret 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial Narasumber
	: Ade Reno, AKS.,MSW (Deputy 1 CEO, Islamic Relief Indonesia))
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 20 Maret 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 5 Surat Pembekalan Peningkatan Analisis Penanggulangan Bencana

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu, 5 April 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana
Narasumber	: Mohd Robi Amri (Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta)
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 3 Maret 2023

Ketua Prodi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Lampiran 6 Surat Undangan Lokakarya

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung 40135 Telp (022) 2504838, 2501330 Faks.(022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

Nomor : 0994 / 9.7/KS.01/04/2023 Bandung, 10 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Lokakarya**

Kepada:
Yth. Kepala Desa Soreang
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Praktikum Laboratorium mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos) Poltekesos Bandung, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk menghadiri Lokakarya yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	**Jumat/ 14 April 2023**
Waktu	:	**Pk. 09.00 – 11.30 WIB**
Acara	:	Lokakarya Praktikum Laboratorium Mahasiswa Poltekesos Bandung
Tempat	:	Kantor Desa Soreang

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perkenannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR

Marjuki

Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Tlp. (022) 7206174-7205759 Fax. (022) 7106286
Website : http://bakesbangpol.jabarprov.go.id Email : bakesbangpol@jabarprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0288/KB.01.04.03/WASDA

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang :

Surat Dari	:	Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Nomor	:	0332/9.7/KS.01/02/2023
Tanggal	:	2 Februari 2023
Perihal	:	Permohonan Izin Melaksanakan Kegiatan Praktikum Laboratorium

Nama	:	**LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI**
Alamat	:	Jl. Riung Karya No. 11 RT 04 RW 09 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
Jabatan/Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
No.Tlp	:	'081224487997
Judul Penelitian	:	-
Bidang Penelitian	:	-
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Bandung/Kota Bandung
Lembaga/IInstansi Yang Dituju	:	Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian	:	Februari – April 2023
Status Penelitian	:	Baru
Anggota Tim Penelitian	:	95 Orang

Diketahui : Di Bandung
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAERAH

Drs. SAPTA YULIANTO DASUKI, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)

2D4C917856

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2D4C917856

Lampiran 8 Pedoman Observasi Lapangan

PEDOMAN OBSERVASI
PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. **Persiapan:**
   a) Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk observasi.
   b) Menentukan tujuan dan fokus pengamatan yang ingin dicapai.
   c) Membaca literatur dan informasi terkait dengan masyarakat yang akan diamati.
2. **Identifikasi objek observasi:**
   a) Menentukan masyarakat atau kelompok sosial yang akan diobservasi sesuai dengan tujuan observasi.
   b) Memastikan sasaran observasi dapat diamati secara langsung dan aman untuk diamati.
3. **Pengamatan:**
   a) Mengamati dengan seksama masyarakat atau kelompok sosial yang dipilih dan mencatat informasi yang relevan dengan tujuan observasi.
   b) Menggunakan alat bantu seperti kamera atau alat ukur jika diperlukan.
   c) Mengamati dengan obyektif dan mencatat informasi secara akurat.
4. **Analisis:**
   a) Menganalisis informasi yang telah didapatkan dan mencoba menemukan pola atau hubungan antar variabel yang diamati.
   b) Menginterpretasikan hasil observasi dan menemukan implikasi praktis dari hasil tersebut.
   c) Tidak ragu untuk kembali mengamati jika terdapat informasi yang tidak cukup jelas atau membingungkan.
5. **Laporan:**
   a) Menyusun laporan hasil observasi dengan struktur yang jelas dan rinci.
   b) Menyertakan data yang didapatkan dari pengamatan beserta analisis dan interpretasi yang telah dilakukan.
   c) Menulis kesimpulan yang didapat dari hasil observasi beserta rekomendasi atau saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Pedoman observasi di masyarakat ini menyesuaikan dengan kebutuhan profil yang diamati dan keadaan lapangan. Serta mempeerhatikan etika dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan berusaha tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh masyarakat.

Lampiran 9 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. **Persiapan:**
   a) Menentukan tujuan dan fokus wawancara yang ingin digali.
   b) Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan dan profil analisis.
   c) Melakukan riset terkait dengan topik yang akan diwawancarai.
2. **Identifikasi responden:**
   a) Menentukan responden yang akan diwawancarai.
   b) Memastikan responden memiliki waktu, pengetahuan, serta pengalaman untuk melakukan wawancara dengan topik yang akan dibahas.
3. **Pengenalan dan perkenalan:**
   a) Memperkenalkan diri dan tujuan wawancara dengan singkat dan jelas.
   b) Menjelaskan bahwa wawancara dilakukan untuk tujuan akademik yang tidak akan merugikan responden atau masyarakat.
4. **Wawancara:**
   a) Mengajukan pertanyaan secara sistematis dan jangan terlalu terburu-buru.
   b) Tidak menginterrupsi responden ketika sedang menjawab pertanyaan.
   c) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden.
   d) Memberikan kesempatan bagi responden untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman secara lebih rinci.
5. **Analisis:**
   a) Menganalisis jawaban dari responden dalam wawancara.
   b) Tidak ragu untuk kembali melakukan wawancara jika terdapat informasi yang tidak cukup jelas atau membingungkan.
6. **Laporan:**
   a) Membuat cacatan singkat hasil wawancara dengan struktur yang jelas.
   b) Mengumpulkan data yang didapatkan dari wawancara.
   c) Menulis kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara beserta rekomendasi atau saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Pedoman wawancara ini menyesuaikan dengan kebutuhan profil yang diamati dan keadaan lapangan. Serta mempeerhatikan etika dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan berusaha tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh masyarakat.

Lampiran 10 Surat Ijin Praktikum

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan Praktikum Laboratorium

Yth. Kepala Desa Soreang
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung
Jawa Barat
Di
Soreang

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi,.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR,

Marjuki

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertinggal.

Lampiran

Nomor : 0141 /7.1.8/DL.02.01/01/2023

Tanggal : 13 Januari 2023

DAFTAR NAMA MAHASISWA PRAKTIKUM LABORATORIUM DI DESA SOREANG KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

NO.	NAMA MAHASISWA	NRP	DOSEN PEMBIMBING
1	Suhailla Sekar Ayu	2003019	A. Nelson Aritonang, Ph.D
2	Akhmad Sulthon Iman Naufal	2003025	Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp
3	Metiara Cahya Ningrum	2003063	
4	Dinda Ratna Wulan	2003119	
5	Yuni Sarasati	2003023	
6	Siti Amelia	2003115	
7	Erlang Adhi Negara	2003116	
8	Muhammad Brilian Salafuddin	2003114	

DIREKTUR,

Marjuki